



**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# TRANSFORMASI DIGITAL UNTUK TRANSFORMASI PEMERINTAHAN

RAKORNAS BIG – WILAYAH JAWA, BALI, NUSA TENGGARA

Jakarta, 14 Juli 2025

# bangga  
melayani  
bangsa

# POTENSI INDONESIA



# WORLD TALENT RANKING 2024



## OVERALL RANKING

	SINGAPURA	<b>#2</b>
	MALAYSIA	<b>#33</b>
	<b>INDONESIA</b>	<b>#46</b>
	THAILAND	<b>#47</b>
	FILIPINA	<b>#63</b>

## Investment and Development Rank

	SINGAPURA	<b>#22</b>
	MALAYSIA	<b>#43</b>
	THAILAND	<b>#46</b>
	<b>INDONESIA</b>	<b>#52</b>
	FILIPINA	<b>#64</b>

## Appeal Rank

	SINGAPURA	<b>#5</b>
	<b>INDONESIA</b>	<b>#17</b>
	THAILAND	<b>#27</b>
	MALAYSIA	<b>#32</b>
	FILIPINA	<b>#54</b>

## Readiness Rank

	SINGAPURA	<b>#1</b>
	MALAYSIA	<b>#27</b>
	<b>INDONESIA</b>	<b>#43</b>
	THAILAND	<b>#49</b>
	FILIPINA	<b>#52</b>



Hasil World Talent Ranking menjadi **pemacu** untuk **memperkuat ekosistem SDM** melalui **reformasi birokrasi** dan **transformasi digital**, agar **talenta Indonesia** semakin **kompetitif** di **pasar global**.



Peringkat **daya saing Indonesia** berada **di tengah** negara **ASEAN**

# TANTANGAN DAN DINAMIKA GLOBAL SEMAKIN KOMPLEKS

**Perubahan Iklim**  
Peningkatan suhu global disertai cuaca ekstrem dan bencana.

**Dunia semakin proteksionis.**

**Disrupsi Teknologi**  
Teknologi akan menggantikan sekitar 40% pekerjaan saat ini.

**Eskalasi Geopolitik dan Geoekonomi**  
Memunculkan fragmentasi dan kekuatan baru.

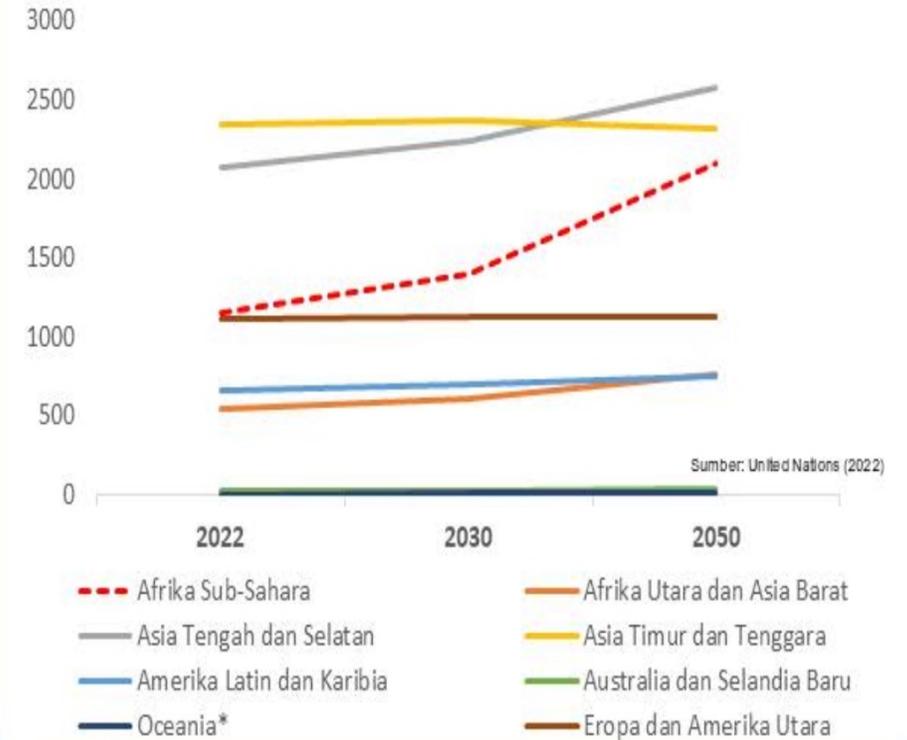
**Demografi Global**  
Penduduk dunia menjadi 9,45 miliar dan porsi lansia meningkat (Asia 55%).

## Perubahan Struktur Demografi Global

Proyeksi pertumbuhan penduduk global pada tahun 2050 menunjukkan pergeseran struktur demografi ke kawasan Afrika, dimana Afrika Sub-Sahara diproyeksikan tumbuh hingga 81,8% dari tahun 2022.



Pertumbuhan Populasi Global Tahun 2050  
(juta jiwa)



\*tidak termasuk Australia dan Selandia Baru

# TANTANGAN DOMESTIK SEMAKIN BESAR

## EKONOMI:



Indonesia terjebak dalam pendapatan kelas menengah selama 30 tahun dan pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan selama 20 tahun terakhir

## PENDIDIKAN:

Skor PISA masih rendah, (Data 2020)



## SDM:

Kualitas SDM Indonesia masih relative rendah

Indeks Modal Manusia, Tahun 2020



## TATA KELOLA:

Capaian skor indeks pelayanan publik pada level provinsi dan kabupaten/kota masih relatif rendah dibanding K/L



(2021)

## KESEHATAN:



Stunting masih tinggi  
**21,5%**



Angka Kematian Ibu masih tinggi  
**189**  
per 100.000 kelahiran



Angka Kematian Bayi masih tinggi  
**16,85**  
per 1000 kelahiran

## KEWILAYAHAN:

Year	KBI	KTI
2014	83%	17%
2023	79,1%	20,9%

Kontirbusi terhadap PDB

Ketimpangan masih relatif tinggi baik pembangunan antar wilayah maupun ketimpangan pendapatan maupun

Year	Rasio Gini
2014	0,414
2024	0,379

## MEGATREN DUNIA 2045

### Demografi Global

Pada tahun 2045, penduduk dunia diperkirakan 9,45 miliar, bertambah 2,1 miliar dari tahun 2015. Lebih dari separuh pertumbuhan penduduk dunia disumbang oleh kawasan Afrika. Penduduk Asia masih terbesar (55 persen). Tren demografi global mendorong urbanisasi, arus migrasi, dan penduduk usia lanjut.

### Urbanisasi Dunia

Penduduk dunia di perkotaan diperkirakan meningkat menjadi 65 persen (2045) dengan 95 persen pertambahan terjadi di *emerging economies*. Pembangunan perkotaan berperan meningkatkan daya saing, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat.

### Peranan *Emerging Economies*

*Output* negara berkembang tahun 2050 diperkirakan mencapai 71 persen dari total *output* dunia dengan Asia sebagai pendorong utama—mencapai 54 persen. Investasi SDM dan infrastruktur serta reformasi struktural dan iklim usaha mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berdaya saing, dan berkesinambungan.

### Perdagangan Internasional

Sampai tahun 2045, perdagangan global diperkirakan tumbuh 3,4 persen per tahun. Negara berkembang menjadi poros perdagangan dan investasi dunia dengan pertumbuhan 6 persen per tahun. Perdagangan intra Asia meningkat dan investasi asing langsung ke dan antar negara berkembang berlanjut.

### Keuangan Internasional

Dominasi mata uang dunia bergeser dari dolar AS menjadi *multi currencies*. Aset keuangan *emerging economies* tahun 2050 diperkirakan melebihi negara maju. Cina berkembang sebagai salah satu sumber keuangan bagi pembangunan mendatang.

### Kelas Menengah

Pada tahun 2050, jumlah *middle* dan *upper income class* diperkirakan lebih dari 84 persen atau sekitar 8,1 miliar orang. Asia dan Amerika Latin akan memiliki jumlah *middle* dan *upper income class* terbesar.

### Persaingan Sumber Daya Alam

Meningkatnya peranan ekonomi Asia dan penduduk di Afrika mendorong persaingan memperebutkan sumber daya alam (SDA). Ketersediaan SDA diperkirakan tidak mampu memenuhi kebutuhan permintaan yang meningkat meskipun teknologi akan meningkatkan efisiensi SDA.

### Teknologi

Tren perubahan teknologi ke depan akan didominasi oleh teknologi informasi dan komunikasi, bioteknologi dan rekayasa genetik, kesehatan dan pengobatan, energi terbarukan, *wearable devices*, otomatisasi dan robotik, serta *artificial intelligence*.

### Perubahan Iklim

Tantangan pemanasan global semakin besar, baik berupa kejadian ekstrim maupun perubahan iklim jangka panjang. Tanpa usaha menurunkan emisi, rata-rata suhu global akan meningkat 3 – 3,5 derajat celsius pada akhir abad ini.

### Perubahan Geopolitik

Perubahan geopolitik terus berlanjut ke depan dengan meningkatnya peranan Cina, kerentanan di Kawasan Timur Tengah, serta meningkatnya kelas baru dan kelompok penentu.

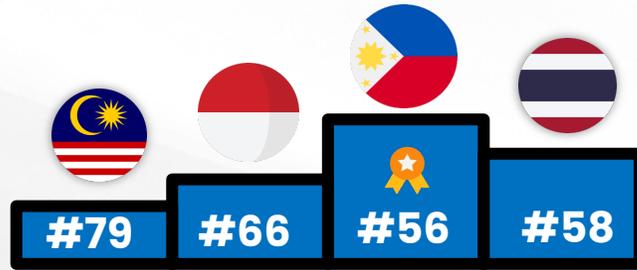


# POTRET BIROKRASI INDONESIA DI PANGGUNG REGIONAL DAN GLOBAL

Meski belum menjadi yang terbaik di ASEAN, Indonesia telah dan akan terus dapat meningkatkan kualitas birokrasi di panggung global, dalam rangka meningkatkan **daya saing internasional**.

## Indeks Efektivitas Pemerintah (2022)

Government Effectiveness Index



Dari 214 negara | Sumber: World Bank

## Indeks Kualitas Regulasi (2023)

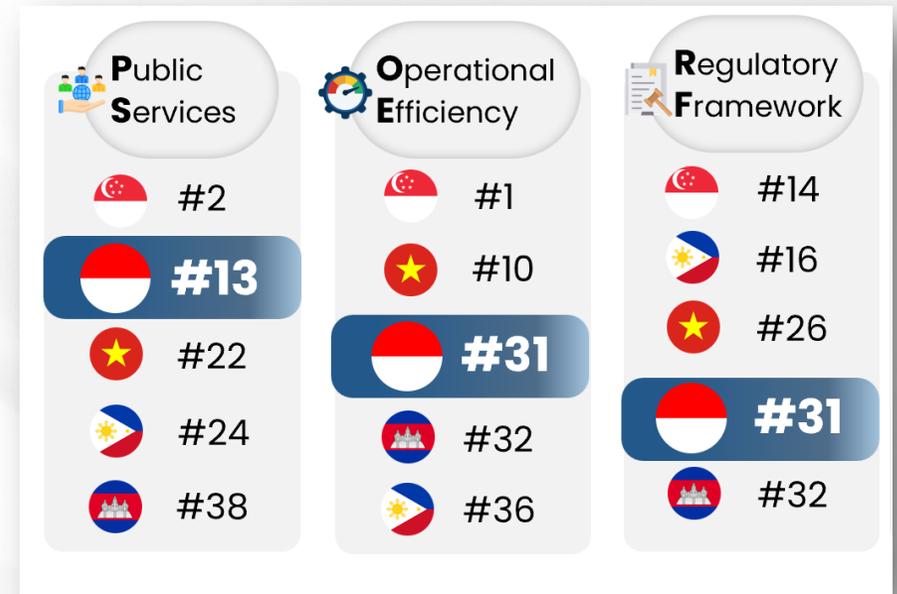
Regulatory Quality



Dari 266 negara | Sumber: World Bank

## Indeks Kemudahan Berusaha (2024)

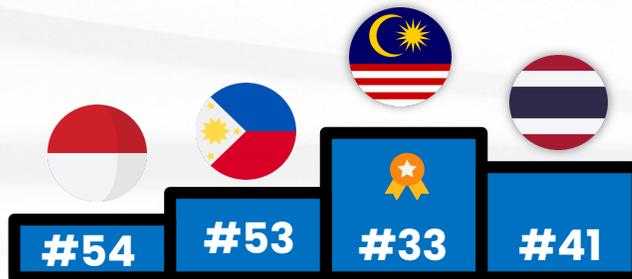
Business Enabling Environment (Business Ready)



Dari 50 negara | Sumber: World Bank

## Indeks Inovasi Pemerintahan (2024)

Government Innovations Index



Dari 113 negara | Sumber: World Intellectual Property Organization

## Indeks Kemajuan e-Government (2024)

Electronic Government Development Index (EGDI)



Dari 193 negara | Sumber: United Nations

# REFORMASI BIROKRASI: APA YANG SUDAH DIHASILKAN?

## BIROKRASI YANG BERORIENTASI HASIL



Dalam dua tahun terakhir (2023-2024), implementasi SAKIP mampu **mencegah potensi pemborosan APBN/APBD sebesar  $\text{Rp}128,5$  Triliun rupiah**

## BIROKRASI DENGAN PELAYANAN PRIMA & BEBAS KKN



**Terbentuk 2.624 unit percontohan pelayanan prima & anti korupsi**, termasuk pada sektor penegak hukum



Program RB telah terkonsolidasi dalam kegiatan **STRANAS PK**

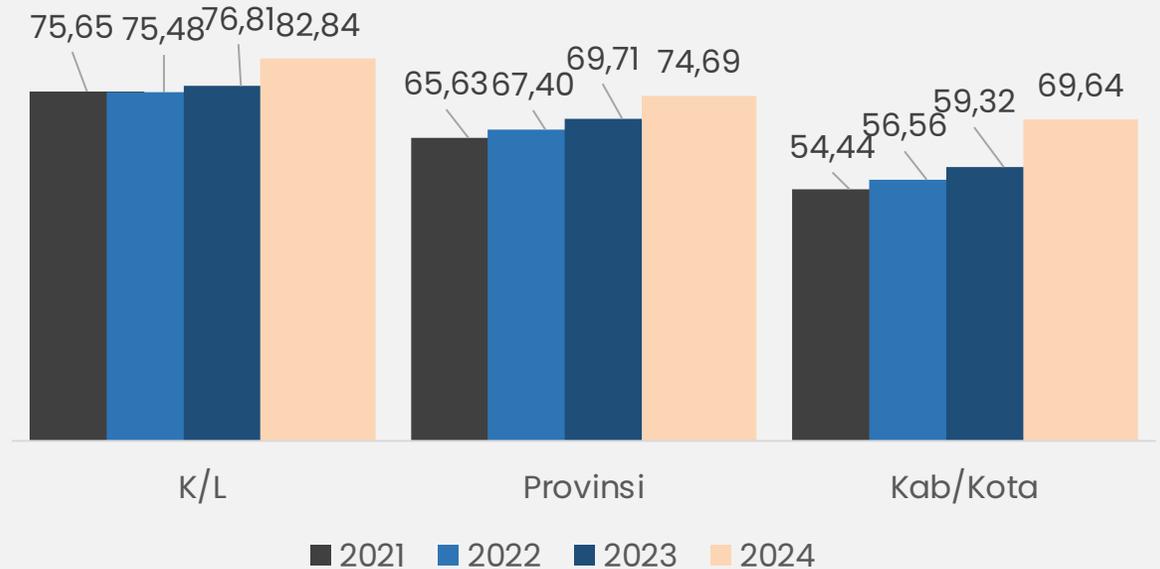


Integrasi penyelenggaraan pelayanan publik melalui pembentukan **272 Mall Pelayanan Publik (MPP) & 91 MPP Digital** di daerah



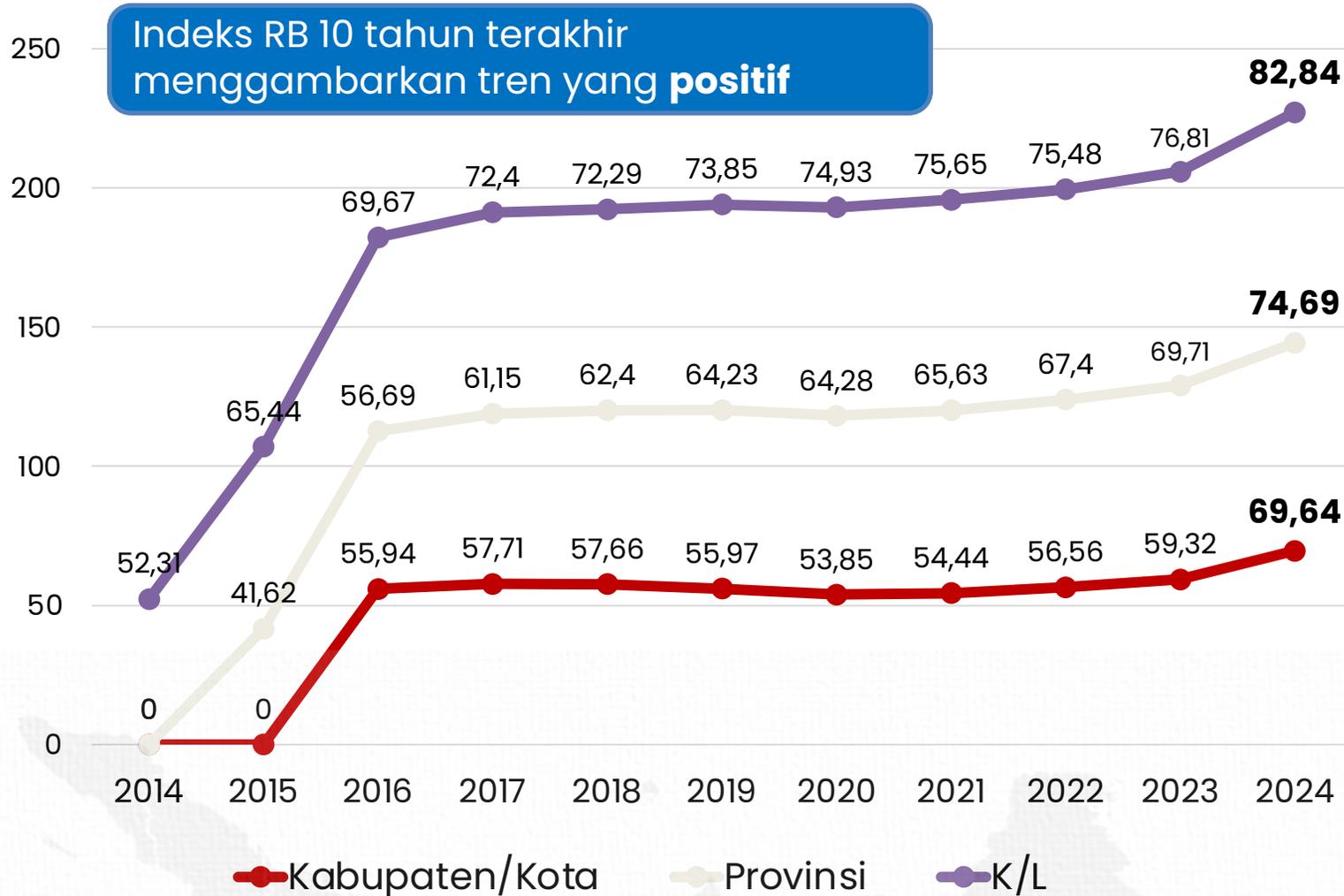
**91% Kementerian** telah memiliki tata kelola SPBE yang baik

Rata-rata Nilai RB 2021-2024



Indeks RB terus mengalami peningkatan dalam empat tahun terakhir.

# TREN INDEKS REFORMASI BIROKRASI INSTANSI DALAM 10 TAHUN TERAKHIR



Dalam 10 tahun terakhir, rata-rata Indeks RB pada K/L dan Pemda semakin meningkat.

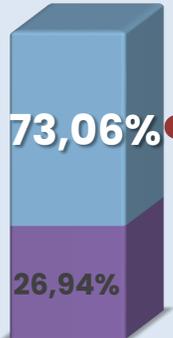
Hal ini menunjukkan **upaya perbaikan tata kelola pemerintahan** yang semakin baik dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien dan mampu memberikan **pelayanan publik prima** kepada masyarakat.

Catatan:

1. Pada evaluasi RB tahun 2014, hanya Kementerian/Lembaga yang dievaluasi
2. Pada evaluasi RB tahun 2015, dilakukan pilot project evaluasi RB pada Pemerintah Kabupaten/Kota

# DAMPAK REFORMASI BIROKRASI

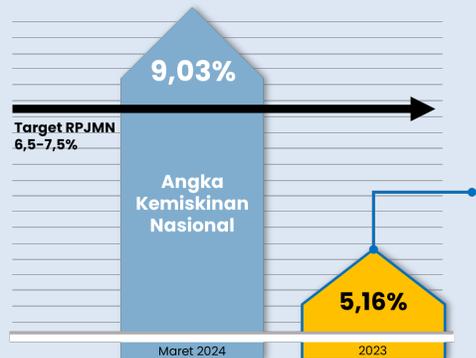
## TERHADAP PENINGKATAN INVESTASI



Pemerintah Daerah yang berpartisipasi dalam RB Tematik Menyumbang **\*73%** dari Total Peningkatan Investasi Indonesia **\*(Meningkat 10% dari tahun 2023)**

Sumber: BKPM, 2025

## TERHADAP ANGKA KEMISKINAN



**87%** kab/kota dengan Nilai RB Tematik yang **signifikan** memiliki rata-rata angka kemiskinan **5,16%** (melampaui target nasional)

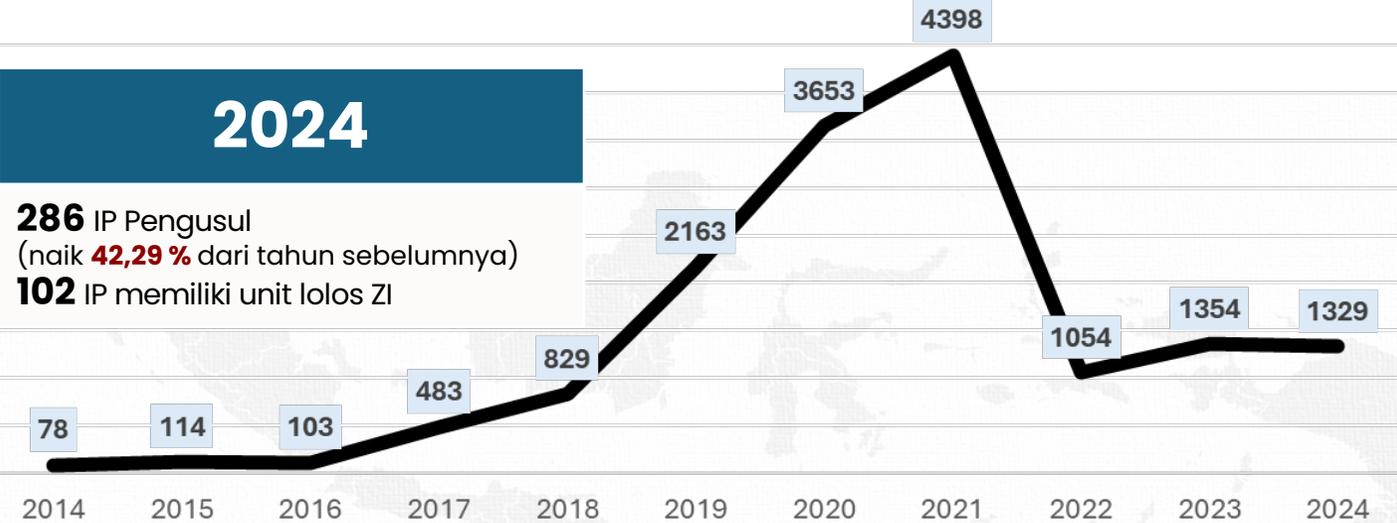
- Angka Kemiskinan Nasional (Maret 2024)
- Rata-rata angka kemiskinan dari 87% Kab/Kota dengan Nilai RB Tematik yang Signifikan

## Zona Integritas: Unit Pecontohan Pelayanan Prima & Anti Korupsi di Berbagai Daerah

### Jumlah Usulan Unit ZI ke Tim Penilai Nasional (TPN)

**2024**

**286** IP Pengusul (naik **42,29%** dari tahun sebelumnya)  
**102** IP memiliki unit lolos ZI

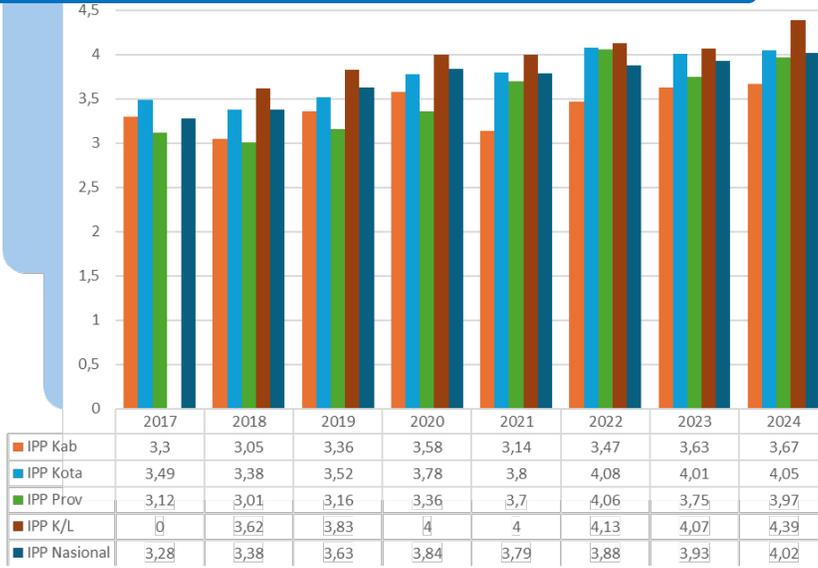


### Jumlah Unit ZI WBK/WBBM

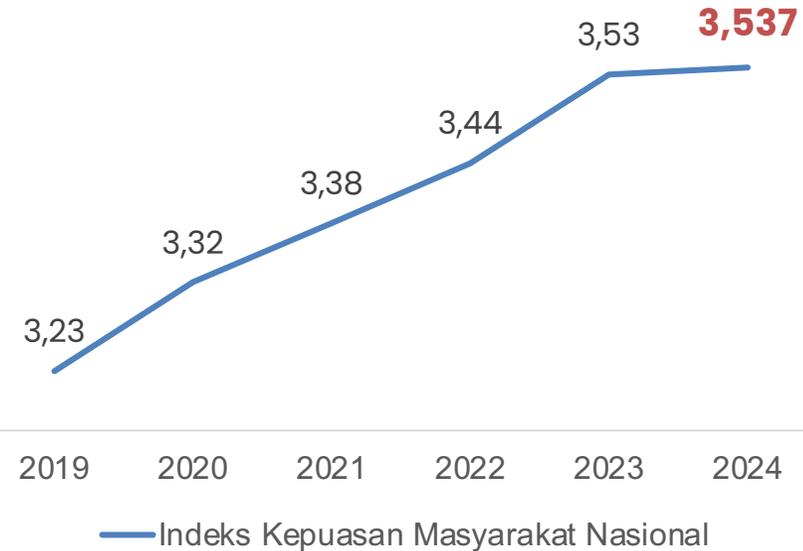
TAHUN	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
<b>WBK</b>	12	12	17	76	200	470	681	486	102	85	161	<b>2302</b>
<b>WBBM</b>	9	1	2	6	5	34	82	72	17	24	70	<b>322</b>

# PELAYANAN PUBLIK TERUS MEMBAIK

## Indeks Pelayanan Publik (IPP) Nasional meningkat secara gradual



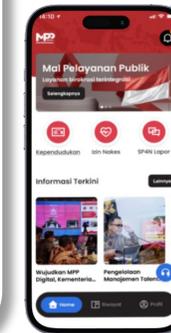
## Indeks Kepuasan Masyarakat Nasional meningkat secara bertahap



Telah beroperasi

**272**

**Mal Pelayanan Publik (MPP)**



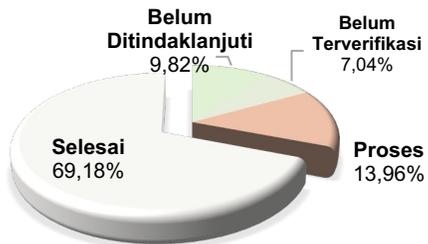
Telah ditetapkan

**199**

**Lokus Mal Pelayanan Publik Digital (MPPD)**

## Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan pada aplikasi LAPOR!

### Status Laporan



### Topik Laporan Paling Banyak



Jalan Berlubang



Kepegawaian



Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat



Konten Penipuan

### K/L/D Penerima Laporan Terbanyak

**12.189**  
KOMDIGI Kementerian Komunikasi dan Digital



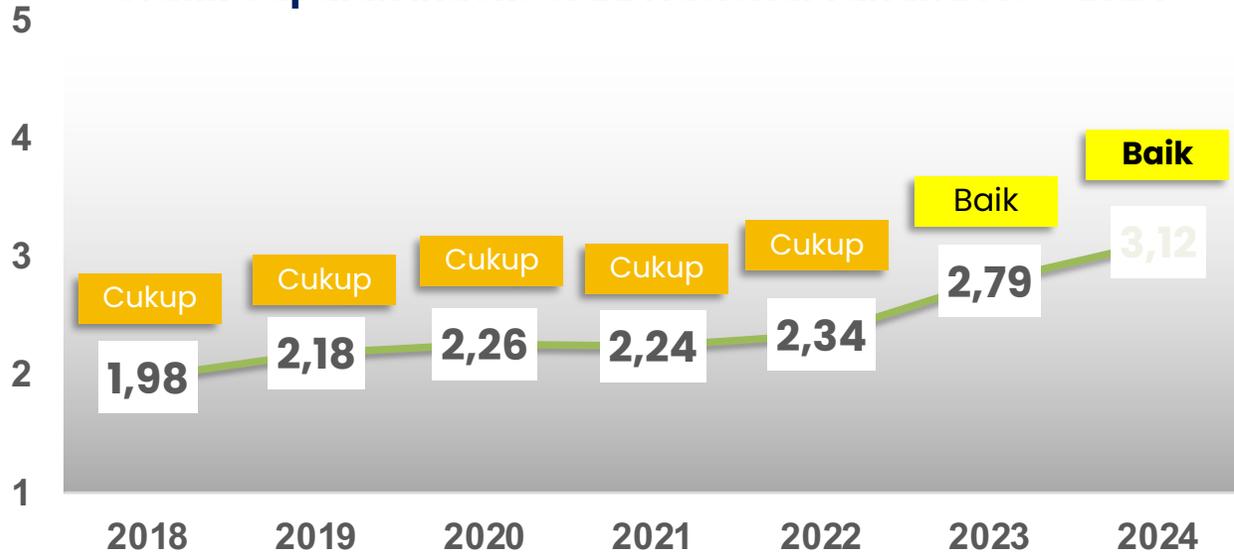
**19.845**  
Kepolisian Negara Republik Indonesia



**3.314**  
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

# PENERAPAN PEMERINTAH DIGITAL TERUS MENINGKAT, SECARA POSITIF MENDORONG TRANSFORMASI DIGITAL INDONESIA DI TINGKAT GLOBAL DAN MEMPERKUAT FONDASI UNTUK KEBERLANJUTAN.

### Grafik Capaian Indeks SPBE Nasional Tahun 2018 – 2024



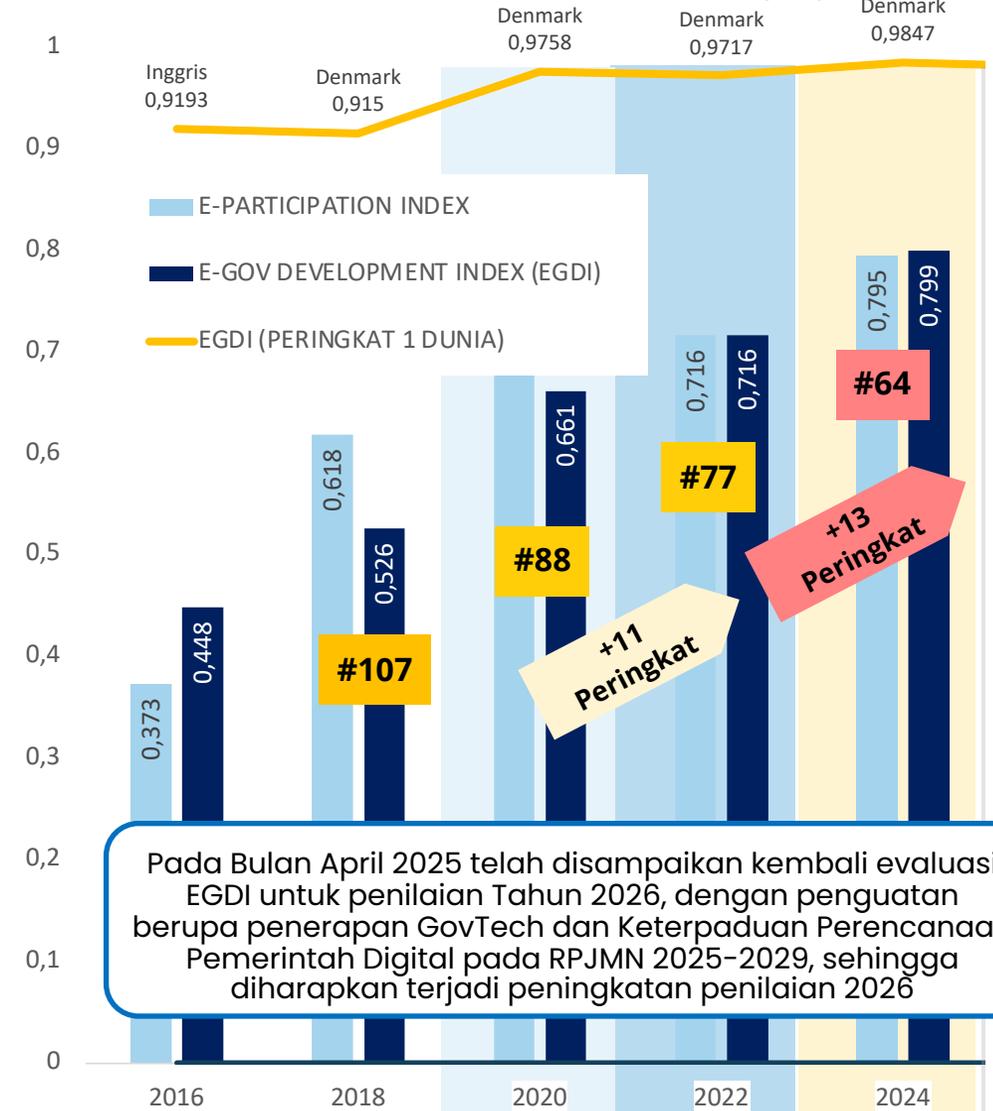
- ✓ Indeks SPBE Nasional Tahun 2024 adalah sebesar **3,12** dengan kategori **"Baik"**
- ✓ Capaian tersebut melampaui target RPJMN 2024 yaitu 2,6 (Skala 5)

**635** Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) yang telah berpartisipasi dalam Evaluasi SPBE s.d. Tahun 2024

Pada periode penilaian 2025–2029 dilakukan peningkatan kualitas evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Digital, tidak hanya kapabilitas Tata Kelola Digital, juga ditambahkan penilaian atas kepuasan pengguna layanan digital pemerintah dan dampak terhadap Pembangunan Nasional

### PERTUMBUHAN SKOR E-GOVERNMENT INDONESIA

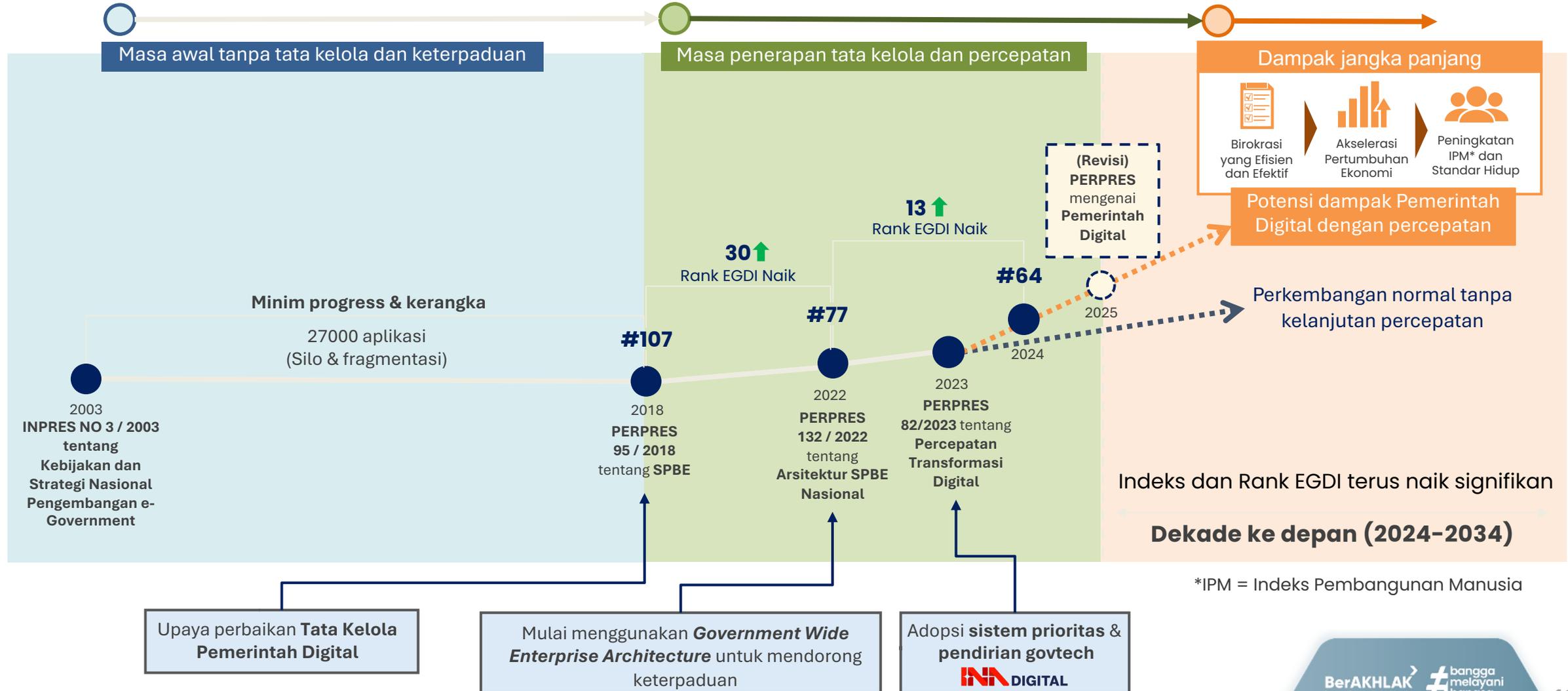
BERDASARKAN UNITED NATIONS E-GOVERNMENT DEVELOPMENT INDEX (EGDI)



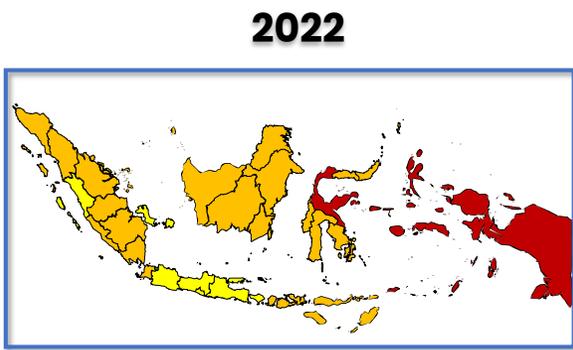
Pada Bulan April 2025 telah disampaikan kembali evaluasi EGDI untuk penilaian Tahun 2026, dengan penguatan berupa penerapan GovTech dan Keterpaduan Perencanaan Pemerintah Digital pada RPJMN 2025–2029, sehingga diharapkan terjadi peningkatan penilaian 2026

# Perjalanan transformasi digital pemerintah yang panjang sedang mengalami momentum percepatan yang signifikan selama beberapa tahun terakhir serta berpotensi untuk terus berkembang secara eksponensial dalam dekade kedepan

Revisi berbagai Perpres terkait SPBE menjadi Perpres Pemerintah Digital penting untuk menjaga momentum kedepan

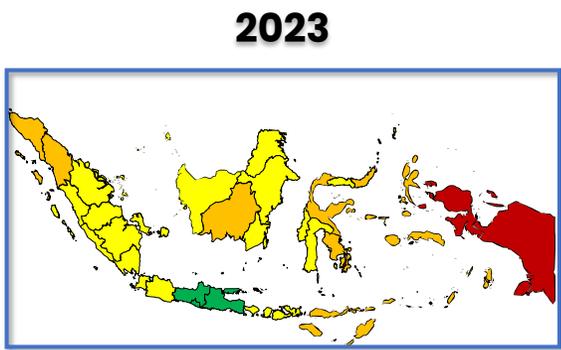


# SEBARAN RATA-RATA PREDIKAT INDEKS SPBE NASIONAL TAHUN 2024



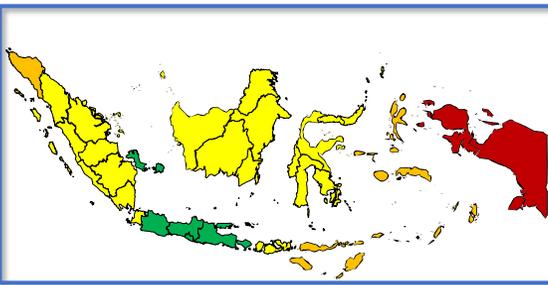
Tahun 2022 terdapat:

- 1 Provinsi kategori "Sangat Baik" →
- 7 Provinsi kategori "Baik" →
- 21 Provinsi kategori "Cukup" →
- 5 Provinsi kategori "Kurang" →



Tahun 2023 terdapat:

- 1 Provinsi kategori "Memuaskan" →
- 3 Provinsi kategori "Sangat Baik" →
- 18 Provinsi kategori "Baik" →
- 10 Provinsi kategori "Cukup" →
- 6 Provinsi kategori "Kurang" →



Tahun 2024 terdapat:

- 1 Provinsi kategori "Memuaskan" →
- 6 Provinsi kategori "Sangat Baik" →
- 21 Provinsi kategori "Baik" →
- 4 Provinsi kategori "Cukup" →
- 6 Provinsi kategori "Kurang" →

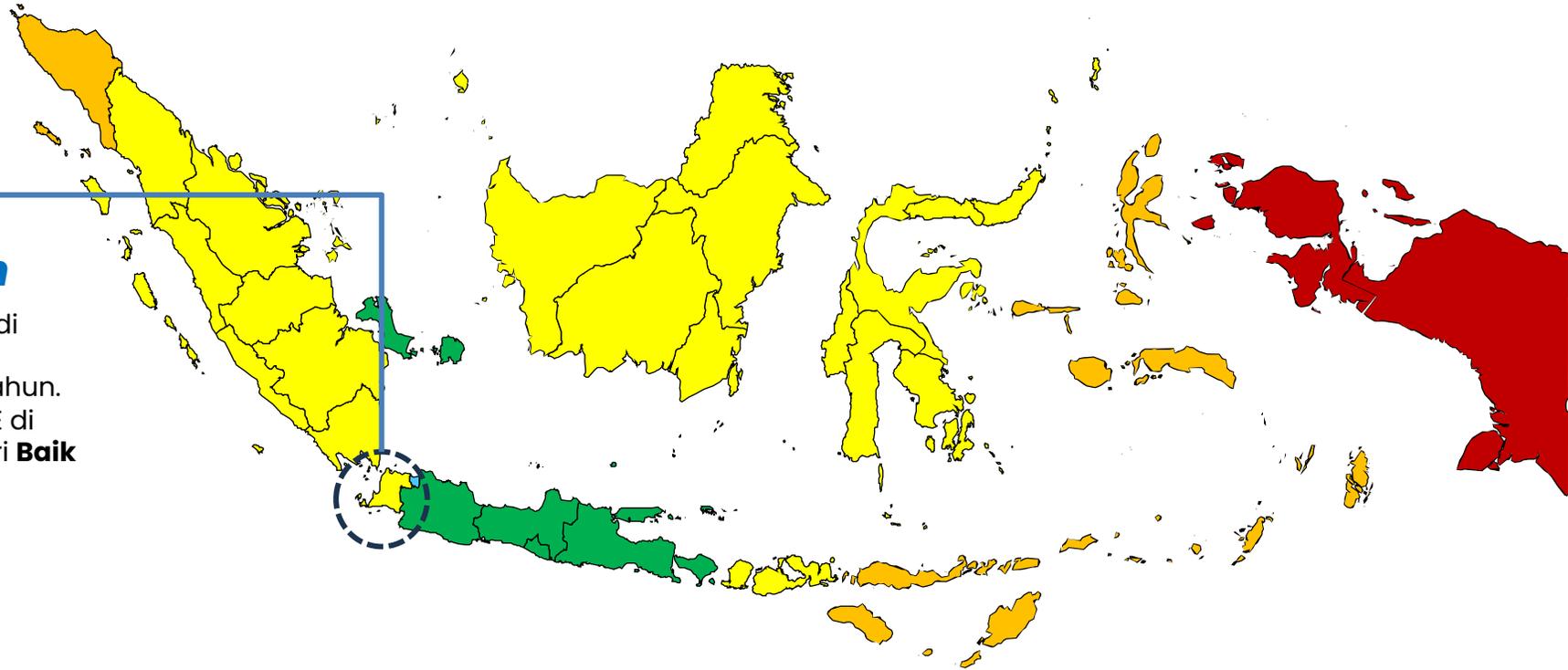


Potensi perkembangan penerapan Pemerintah Digital di Kawasan Kalimantan

# SEBARAN RATA-RATA PREDIKAT INDEKS SPBE WILAYAH BANTEN TAHUN 2024

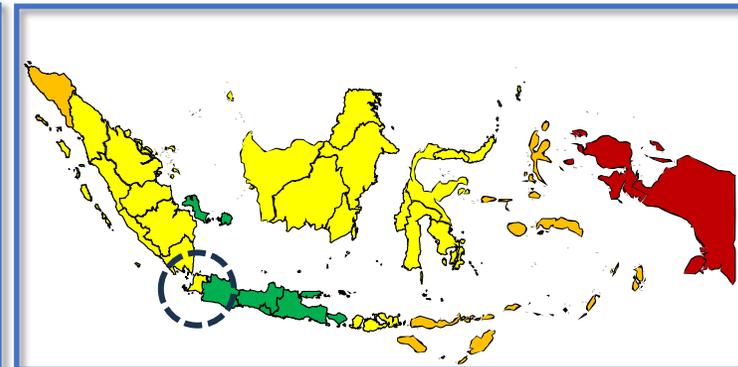
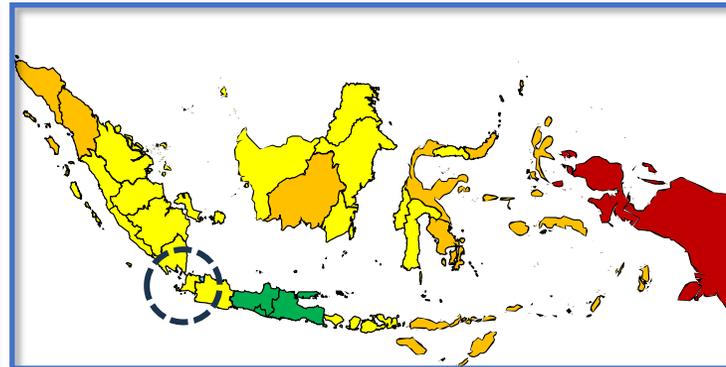
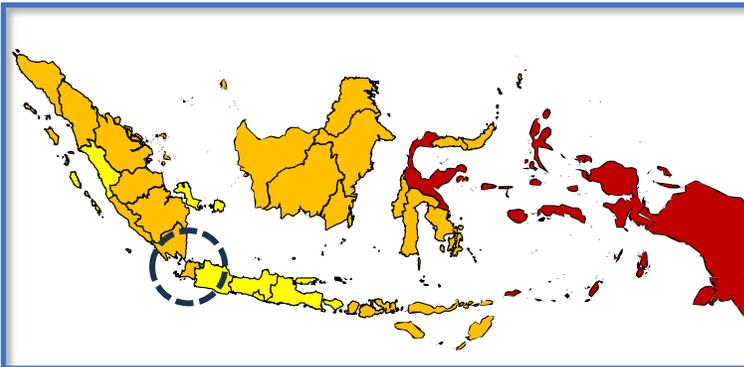
## Highlight Capaian

- Capaian implementasi SPBE di Provinsi Banten **mengalami peningkatan** dari tahun ke tahun.
- Saat ini rata-rata Indeks SPBE di Provinsi Banten pada kategori **Baik** dengan **Indeks 3,40**



2022

2023



Predikat  
SPBE

Memuaskan

Sangat Baik

Baik

Cukup

Kurang

# CAPAIAN INDEKS SPBE PEMERINTAH DAERAH DI WILAYAH BANTEN

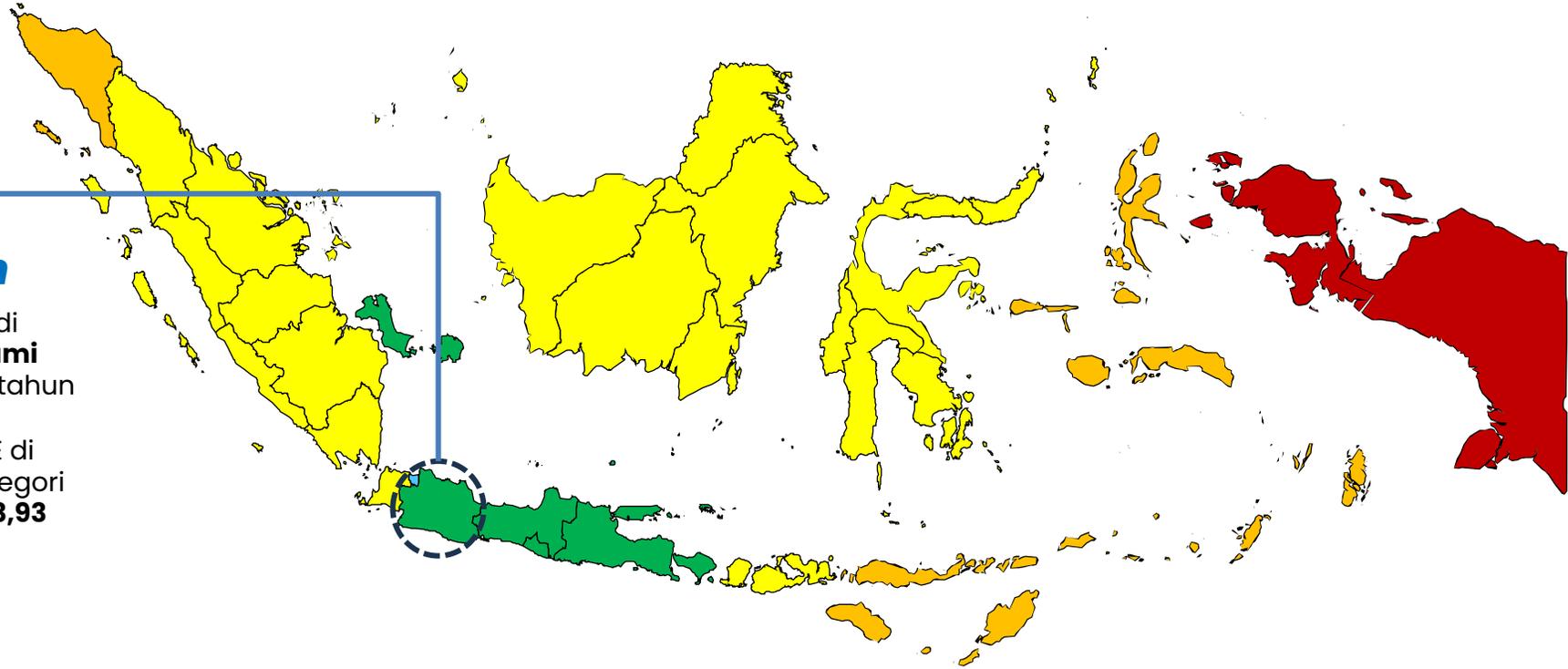
PEMERINTAH DAERAH	MEMUASKAN (4,2 – 5,0)	SANGAT BAIK (3,5 – < 4,5)	BAIK (2,6 – < 3,5)	CUKUP (1,8 – < 2,6)	KURANG (1,8 – < 2,6)	JUMLAH
<b>Provinsi</b>	-	-	1	-	-	<b>1</b>
<b>Kabupaten</b>	-	3	1	-	-	<b>4</b>
<b>Kota</b>	-	1	2	1	-	<b>4</b>
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>9</b>

No	Nama Instansi	Aspek 1	Aspek 2	Aspek 3	Aspek 4	Aspek 5	Aspek 6	Aspek 7	Aspek 8	Domain 1	Domain 2	Domain 3	Domain 4	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Kab. Tangerang	3,50	2,75	3,75	3,50	2,88	2,67	4,70	4,83	3,50	3,30	2,82	4,75	3,91	Sangat Baik
2	Pemerintah Kota Tangerang	3,80	3,50	5,00	5,00	2,13	2,67	4,00	4,33	3,80	4,40	2,27	4,13	3,85	Sangat Baik
3	Pemerintah Kab. Serang	5,00	3,25	3,25	4,00	2,38	1,33	4,00	4,33	5,00	3,40	2,09	4,13	3,73	Sangat Baik
4	Pemerintah Kab. Lebak	5,00	3,00	2,75	3,50	2,13	1,00	4,10	3,83	5,00	3,00	1,82	3,99	3,52	Sangat Baik
5	Pemerintah Kota Tangerang Selatan	3,90	3,00	4,75	3,50	2,13	3,33	3,60	3,50	3,90	3,80	2,45	3,56	3,48	Baik
6	Pemerintah Provinsi Banten	2,90	3,25	3,25	4,00	2,75	2,00	3,90	4,17	2,90	3,40	2,55	4,01	3,47	Baik
7	Pemerintah Kab. Pandeglang	3,10	2,75	2,50	3,50	2,75	2,33	4,10	4,33	3,10	2,80	2,64	4,19	3,45	Baik
8	Pemerintah Kota Serang	1,80	1,75	1,50	3,00	1,00	1,00	3,70	4,00	1,80	1,90	1,00	3,82	2,61	Baik
9	Pemerintah Kota Cilegon	2,50	2,25	2,00	1,50	1,50	1,00	3,40	3,17	2,50	2,00	1,36	3,31	2,56	Cukup

# SEBARAN RATA-RATA PREDIKAT INDEKS SPBE WILAYAH JAWA BARAT TAHUN 2024

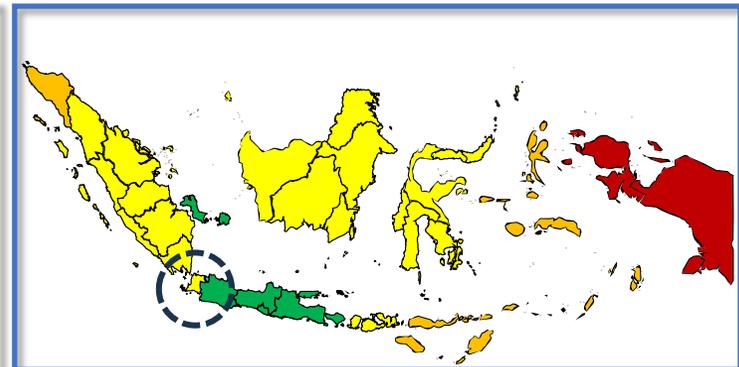
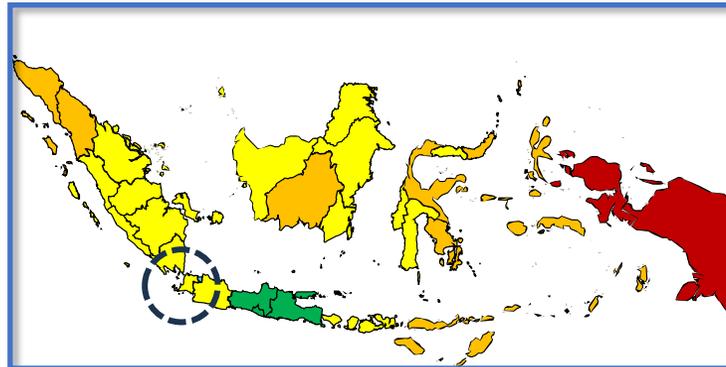
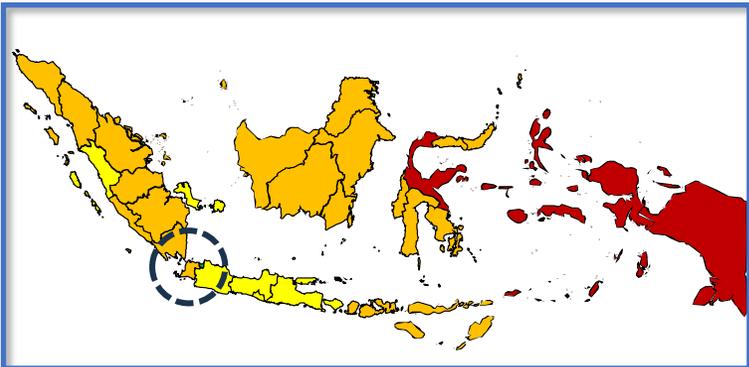
## Highlight Capaian

- Capaian implementasi SPBE di Provinsi Jawa Barat **mengalami peningkatan signifikan** dari tahun ke tahun.
- Saat ini rata-rata Indeks SPBE di Provinsi Jawa Barat pada kategori **Sangat Baik** dengan **Indeks 3,93**



2022

2023



Predikat  
SPBE

Memuaskan

Sangat Baik

Baik

Cukup

Kurang

# CAPAIAN INDEKS SPBE PEMERINTAH DAERAH DI JAWA BARAT

PEMERINTAH DAERAH	MEMUASKAN (4,2 – 5,0)	SANGAT BAIK (3,5 – < 4,5)	BAIK (2,6 – < 3,5)	CUKUP (1,8 – < 2,6)	KURANG (1,8 – < 2,6)	JUMLAH
<b>Provinsi</b>	1	-	-	-	-	<b>1</b>
<b>Kabupaten</b>	2	14	2	-	-	<b>18</b>
<b>Kota</b>	2	7	-	-	-	<b>9</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8</b>

No	Nama Instansi	Aspek 1	Aspek 2	Aspek 3	Aspek 4	Aspek 5	Aspek 6	Aspek 7	Aspek 8	Domain 1	Domain 2	Domain 3	Domain 4	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	5,00	4,75	5,00	5,00	4,25	2,67	4,80	5,00	5,00	4,90	3,82	4,88	4,73	Memuaskan
2	Pemerintah Kota Bandung	5,00	4,50	5,00	5,00	4,88	2,33	4,30	4,83	5,00	4,80	4,18	4,51	4,59	Memuaskan
3	Pemerintah Kab. Sumedang	5,00	3,25	5,00	5,00	4,38	2,67	4,60	4,83	5,00	4,30	3,91	4,69	4,51	Memuaskan
4	Pemerintah Kab. Karawang	4,90	3,75	4,50	5,00	3,50	3,00	4,50	5,00	4,90	4,30	3,36	4,70	4,40	Memuaskan
5	Pemerintah Kota Depok	4,90	4,50	3,75	5,00	3,38	2,00	4,40	5,00	4,90	4,30	3,00	4,64	4,32	Memuaskan
6	Pemerintah Kota Cimahi	3,80	3,00	4,50	4,00	3,38	3,00	4,60	5,00	3,80	3,80	3,27	4,76	4,15	Sangat Baik
7	Pemerintah Kota Cirebon	4,70	3,50	4,50	4,50	3,50	3,00	4,10	4,50	4,70	4,10	3,36	4,26	4,13	Sangat Baik
8	Pemerintah Kab. Bogor	4,00	3,75	4,00	4,00	3,13	2,67	4,40	5,00	4,00	3,90	3,00	4,64	4,10	Sangat Baik
9	Pemerintah Kota Bogor	4,10	4,00	3,75	4,00	3,88	3,00	4,00	4,83	4,10	3,90	3,64	4,33	4,08	Sangat Baik
10	Pemerintah Kab. Bekasi	4,70	3,00	3,50	4,50	3,13	3,00	4,40	4,83	4,70	3,50	3,09	4,57	4,08	Sangat Baik
11	Pemerintah Kab. Bandung	4,60	3,25	4,00	4,00	2,38	2,67	4,30	4,83	4,60	3,70	2,45	4,51	3,98	Sangat Baik
12	Pemerintah Kota Tasikmalaya	3,90	3,50	4,00	3,50	2,75	2,67	4,30	5,00	3,90	3,70	2,73	4,58	3,96	Sangat Baik
13	Pemerintah Kab. Sukabumi	4,70	4,00	1,75	3,50	2,63	3,00	4,50	5,00	4,70	3,00	2,73	4,70	3,95	Sangat Baik
14	Pemerintah Kab. Purwakarta	3,90	2,75	4,00	4,00	3,00	2,67	4,40	4,83	3,90	3,50	2,91	4,57	3,94	Sangat Baik
15	Pemerintah Kab. Indramayu	4,60	2,50	4,75	4,50	2,88	2,33	4,30	4,17	4,60	3,80	2,73	4,25	3,93	Sangat Baik

# CAPAIAN INDEKS SPBE PEMERINTAH DAERAH DI JAWA BARAT

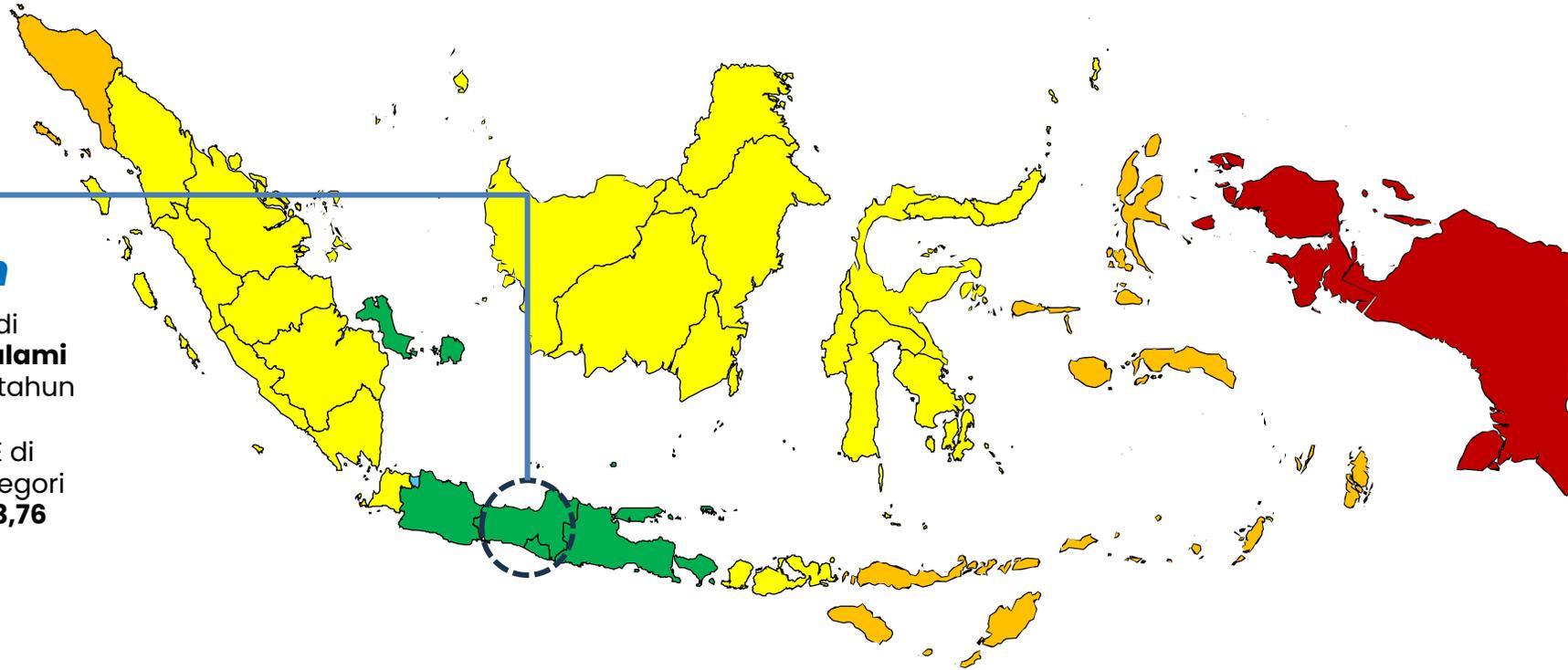
PEMERINTAH DAERAH	MEMUASKAN (4,2 – 5,0)	SANGAT BAIK (3,5 – < 4,5)	BAIK (2,6 – < 3,5)	CUKUP (1,8 – < 2,6)	KURANG (1,8 – < 2,6)	JUMLAH
<b>Provinsi</b>	1	-	-	-	-	<b>1</b>
<b>Kabupaten</b>	2	14	2	-	-	<b>18</b>
<b>Kota</b>	2	7	-	-	-	<b>9</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8</b>

No	Nama Instansi	Aspek 1	Aspek 2	Aspek 3	Aspek 4	Aspek 5	Aspek 6	Aspek 7	Aspek 8	Domain 1	Domain 2	Domain 3	Domain 4	Indeks	Predikat
16	Pemerintah Kab. Garut	5,00	3,25	4,75	4,00	2,50	2,00	4,00	4,17	5,00	4,00	2,36	4,07	3,89	Sangat Baik
17	Pemerintah Kota Bekasi	4,10	2,50	3,75	4,00	2,50	2,67	4,50	4,50	4,10	3,30	2,55	4,50	3,83	Sangat Baik
18	Pemerintah Kota Sukabumi	4,20	3,25	4,00	4,50	3,25	3,00	3,70	4,17	4,20	3,80	3,18	3,88	3,79	Sangat Baik
19	Pemerintah Kab. Bandung Barat	4,40	3,25	3,75	1,50	3,25	3,00	4,00	4,50	4,40	3,10	3,18	4,20	3,78	Sangat Baik
20	Pemerintah Kab. Tasikmalaya	4,40	1,75	4,50	3,00	1,00	1,00	4,90	5,00	4,40	3,10	1,00	4,94	3,76	Sangat Baik
21	Pemerintah Kab. Cianjur	4,10	2,75	3,75	4,00	2,13	2,00	4,30	4,67	4,10	3,40	2,09	4,45	3,75	Sangat Baik
22	Pemerintah Kab. Ciamis	5,00	2,50	3,00	3,50	2,13	3,00	3,90	4,50	5,00	2,90	2,36	4,14	3,65	Sangat Baik
23	Pemerintah Kab. Cirebon	4,10	3,25	3,00	3,00	2,38	2,33	3,90	4,67	4,10	3,10	2,36	4,20	3,61	Sangat Baik
24	Pemerintah Kota Banjar	3,50	2,75	3,00	3,50	1,50	2,67	4,50	4,67	3,50	3,00	1,82	4,57	3,58	Sangat Baik
25	Pemerintah Kab. Kuningan	3,00	3,25	2,50	4,50	2,88	2,67	4,00	4,50	3,00	3,20	2,82	4,20	3,57	Sangat Baik
26	Pemerintah Kab. Pangandaran	5,00	3,00	2,25	4,00	2,13	1,00	4,00	4,33	5,00	2,90	1,82	4,13	3,56	Sangat Baik
27	Pemerintah Kab. Subang	3,30	3,00	3,50	3,00	2,38	1,00	3,80	4,33	3,30	3,20	2,00	4,01	3,38	Baik
28	Pemerintah Kab. Majalengka	2,90	2,75	2,75	1,50	1,00	1,00	3,60	4,33	2,90	2,50	1,00	3,89	2,94	Baik

# SEBARAN RATA-RATA PREDIKAT INDEKS SPBE WILAYAH JAWA TENGAH TAHUN 2024

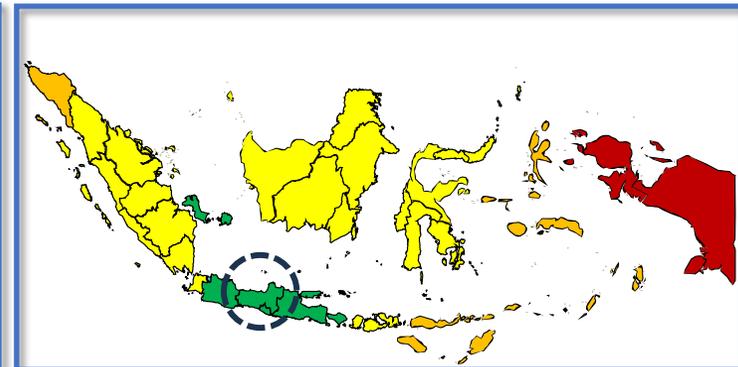
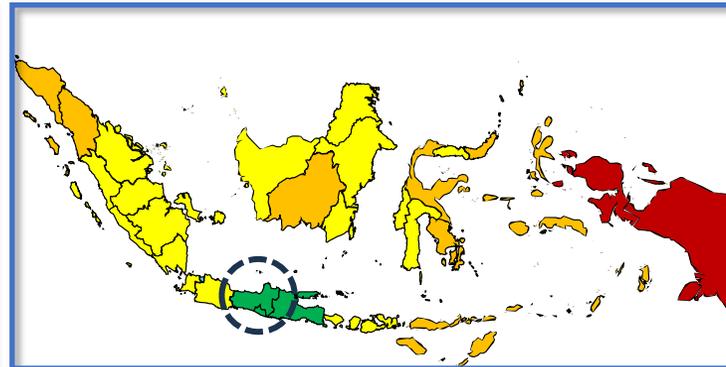
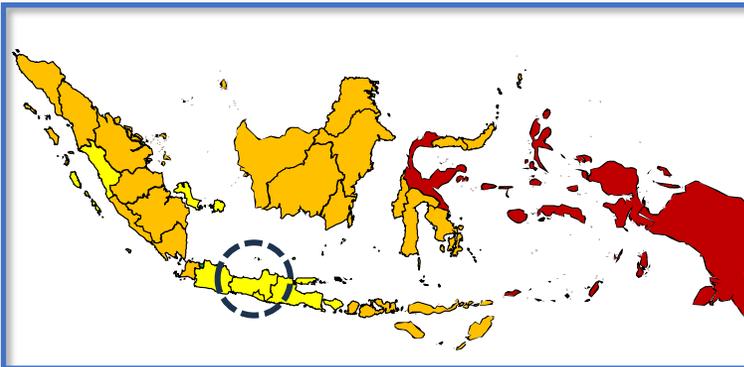
## Highlight Capaian

- Capaian implementasi SPBE di Provinsi Jawa Tengah mengalami **peningkatan signifikan** dari tahun ke tahun.
- Saat ini rata-rata Indeks SPBE di Provinsi Jawa Barat pada kategori **Sangat Baik** dengan **Indeks 3,76**



2022

2023



Predikat  
SPBE

Memuaskan

Sangat Baik

Baik

Cukup

Kurang

# CAPAIAN INDEKS SPBE PEMERINTAH DAERAH DI JAWA TENGAH

PEMERINTAH DAERAH	MEMUASKAN (4,2 – 5,0)	SANGAT BAIK (3,5 – < 4,5)	BAIK (2,6 – < 3,5)	CUKUP (1,8 – < 2,6)	KURANG (1,8 – < 2,6)	JUMLAH
<b>Provinsi</b>	1	-	-	-	-	<b>1</b>
<b>Kabupaten</b>	4	17	8	-	-	<b>29</b>
<b>Kota</b>	1	5	-	-	-	<b>6</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>22</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36</b>

No	Nama Instansi	Aspek 1	Aspek 2	Aspek 3	Aspek 4	Aspek 5	Aspek 6	Aspek 7	Aspek 8	Domain 1	Domain 2	Domain 3	Domain 4	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Kab. Sukoharjo	4,90	3,50	5,00	4,50	3,75	2,67	4,60	5,00	4,90	4,30	3,45	4,76	4,45	Memuaskan
2	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	4,90	3,75	4,75	4,00	3,63	3,00	4,70	4,83	4,90	4,20	3,45	4,75	4,42	Memuaskan
3	Pemerintah Kab. Sragen	5,00	3,50	3,75	3,50	3,25	3,33	5,00	4,83	5,00	3,60	3,27	4,93	4,34	Memuaskan
4	Pemerintah Kota Surakarta	5,00	4,00	4,25	4,50	2,75	3,00	4,50	5,00	5,00	4,20	2,82	4,70	4,30	Memuaskan
5	Pemerintah Kab. Kudus	3,80	4,00	4,25	3,00	3,38	3,00	4,80	5,00	3,80	3,90	3,27	4,88	4,23	Memuaskan
6	Pemerintah Kab. Wonogiri	5,00	4,00	4,50	4,50	2,75	2,67	4,20	4,83	5,00	4,30	2,73	4,45	4,20	Memuaskan
7	Pemerintah Kab. Banyumas	4,50	3,75	3,50	4,50	2,50	2,67	4,60	4,83	4,50	3,80	2,55	4,69	4,09	Sangat Baik
8	Pemerintah Kab. Kebumen	4,60	3,50	3,00	4,00	2,13	2,67	4,90	5,00	4,60	3,40	2,27	4,94	4,07	Sangat Baik
9	Pemerintah Kab. Klaten	4,50	3,50	4,50	4,00	2,13	2,67	4,40	5,00	4,50	4,00	2,27	4,64	4,07	Sangat Baik
10	Pemerintah Kab. Rembang	4,40	3,00	5,00	2,50	2,50	3,00	4,20	5,00	4,40	3,70	2,64	4,52	3,99	Sangat Baik
11	Pemerintah Kota Semarang	5,00	3,00	4,50	3,00	2,25	2,33	4,20	4,83	5,00	3,60	2,27	4,45	3,95	Sangat Baik
12	Pemerintah Kota Tegal	5,00	3,00	4,00	4,50	2,88	2,67	4,00	4,50	5,00	3,70	2,82	4,20	3,95	Sangat Baik
13	Pemerintah Kab. Demak	3,60	3,50	4,50	3,00	2,88	2,67	4,40	4,67	3,60	3,80	2,82	4,51	3,93	Sangat Baik
14	Pemerintah Kab. Purbalingga	4,40	3,25	4,50	3,00	2,75	2,67	4,80	3,67	4,40	3,70	2,73	4,35	3,93	Sangat Baik
15	Pemerintah Kab. Magelang	4,90	4,00	4,25	4,00	2,13	2,00	3,90	4,67	4,90	4,10	2,09	4,20	3,92	Sangat Baik

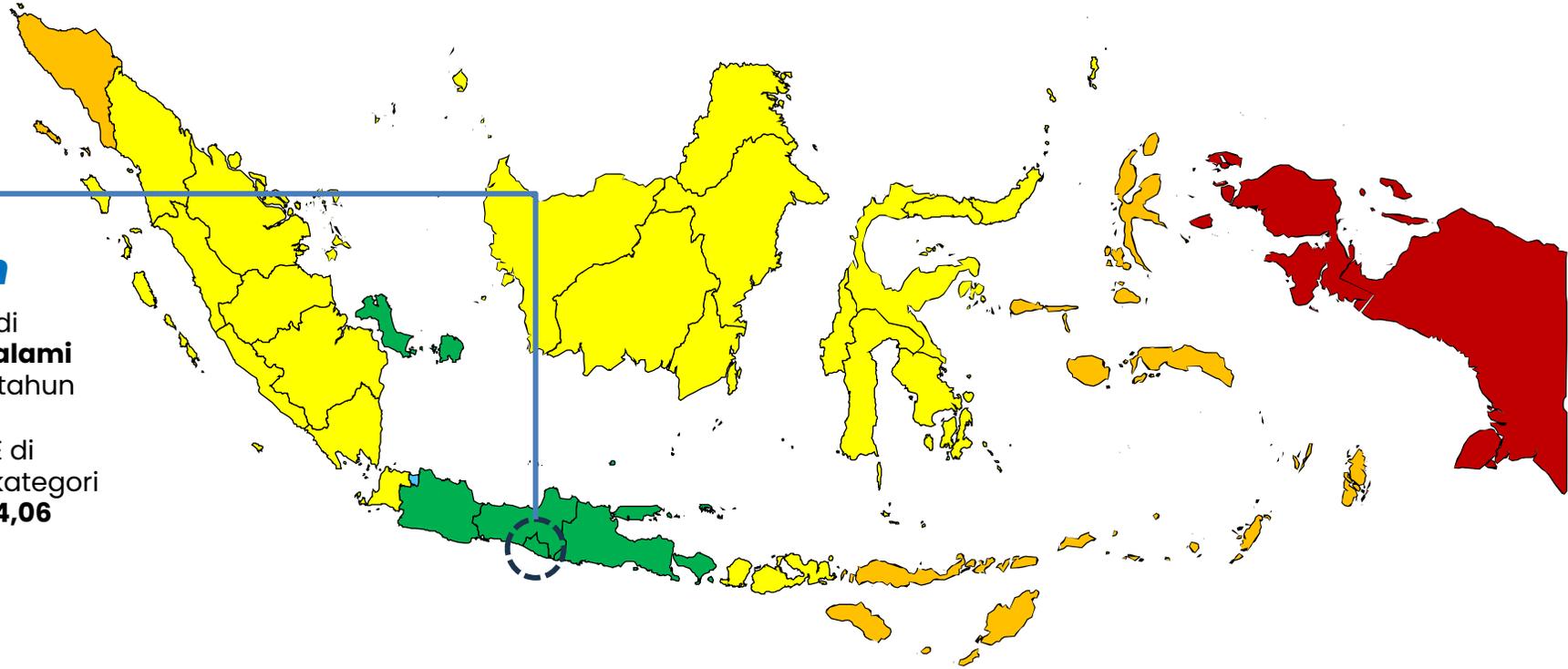
# CAPAIAN INDEKS SPBE PEMERINTAH DAERAH DI JAWA TENGAH

No	Nama Instansi	Aspek 1	Aspek 2	Aspek 3	Aspek 4	Aspek 5	Aspek 6	Aspek 7	Aspek 8	Domain 1	Domain 2	Domain 3	Domain 4	Indeks	Predikat
16	Pemerintah Kab. Karanganyar	4,90	3,50	5,00	4,50	3,75	2,67	4,60	5,00	4,90	4,30	3,45	4,76	4,45	Memuaskan
17	Pemerintah Kab. Boyolali	4,90	3,75	4,75	4,00	3,63	3,00	4,70	4,83	4,90	4,20	3,45	4,75	4,42	Memuaskan
18	Pemerintah Kab. Wonosobo	5,00	3,50	3,75	3,50	3,25	3,33	5,00	4,83	5,00	3,60	3,27	4,93	4,34	Memuaskan
19	Pemerintah Kota Pekalongan	5,00	4,00	4,25	4,50	2,75	3,00	4,50	5,00	5,00	4,20	2,82	4,70	4,30	Memuaskan
20	Pemerintah Kab. Pati	3,80	4,00	4,25	3,00	3,38	3,00	4,80	5,00	3,80	3,90	3,27	4,88	4,23	Memuaskan
21	Pemerintah Kab. Banjarnegara	5,00	4,00	4,50	4,50	2,75	2,67	4,20	4,83	5,00	4,30	2,73	4,45	4,20	Memuaskan
22	Pemerintah Kota Magelang	4,50	3,75	3,50	4,50	2,50	2,67	4,60	4,83	4,50	3,80	2,55	4,69	4,09	Sangat Baik
23	Pemerintah Kab. Kendal	4,60	3,50	3,00	4,00	2,13	2,67	4,90	5,00	4,60	3,40	2,27	4,94	4,07	Sangat Baik
24	Pemerintah Kab. Temanggung	4,50	3,50	4,50	4,00	2,13	2,67	4,40	5,00	4,50	4,00	2,27	4,64	4,07	Sangat Baik
25	Pemerintah Kota Salatiga	4,40	3,00	5,00	2,50	2,50	3,00	4,20	5,00	4,40	3,70	2,64	4,52	3,99	Sangat Baik
26	Pemerintah Kab. Grobogan	5,00	3,00	4,50	3,00	2,25	2,33	4,20	4,83	5,00	3,60	2,27	4,45	3,95	Sangat Baik
27	Pemerintah Kab. Batang	5,00	3,00	4,00	4,50	2,88	2,67	4,00	4,50	5,00	3,70	2,82	4,20	3,95	Sangat Baik
28	Pemerintah Kab. Jepara	3,60	3,50	4,50	3,00	2,88	2,67	4,40	4,67	3,60	3,80	2,82	4,51	3,93	Sangat Baik
29	Pemerintah Kab. Purworejo	4,40	3,25	4,50	3,00	2,75	2,67	4,80	3,67	4,40	3,70	2,73	4,35	3,93	Sangat Baik
30	Pemerintah Kab. Semarang	4,90	4,00	4,25	4,00	2,13	2,00	3,90	4,67	4,90	4,10	2,09	4,20	3,92	Sangat Baik
31	Pemerintah Kab. Blora	3,50	3,00	2,00	3,00	1,38	1,67	4,20	4,33	3,50	2,60	1,45	4,25	3,28	Baik
32	Pemerintah Kab. Cilacap	4,20	2,50	2,50	3,50	1,75	2,33	3,80	3,83	4,20	2,70	1,91	3,81	3,27	Baik
33	Pemerintah Kab. Tegal	3,40	2,00	2,75	2,00	2,50	1,33	4,20	3,50	3,40	2,30	2,18	3,92	3,16	Baik
34	Pemerintah Kab. Pekalongan	2,90	2,50	2,50	2,00	2,13	1,33	4,00	3,67	2,90	2,40	1,91	3,87	3,05	Baik
35	Pemerintah Kab. Pemalang	2,30	2,25	2,75	2,00	1,75	1,00	3,80	4,67	2,30	2,40	1,55	4,14	3,04	Baik
36	Pemerintah Kab. Brebes	2,80	1,75	2,50	3,00	1,00	1,00	3,60	4,17	2,80	2,30	1,00	3,82	2,84	Baik

# SEBARAN RATA-RATA PREDIKAT INDEKS SPBE WILAYAH DI YOGYAKARTA TAHUN 2024

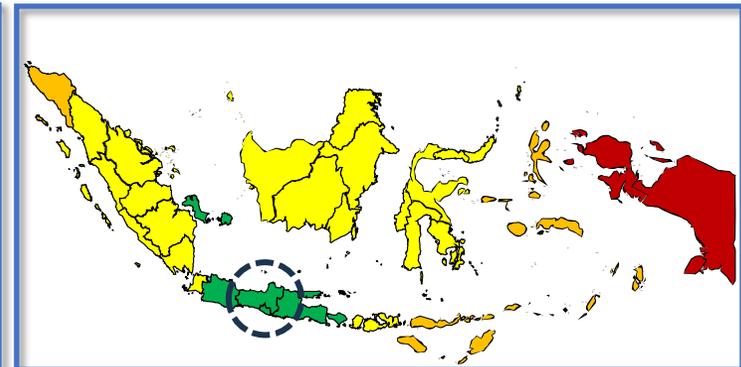
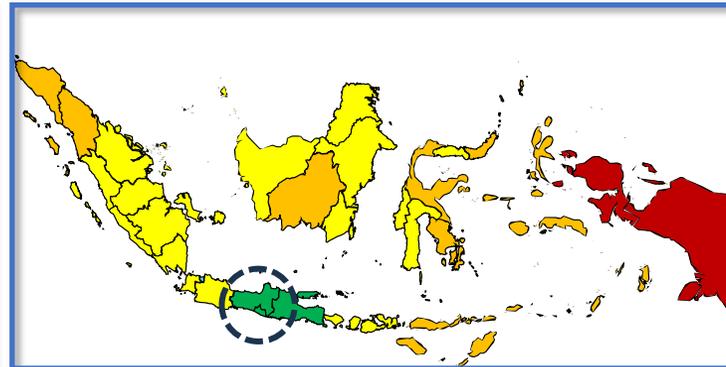
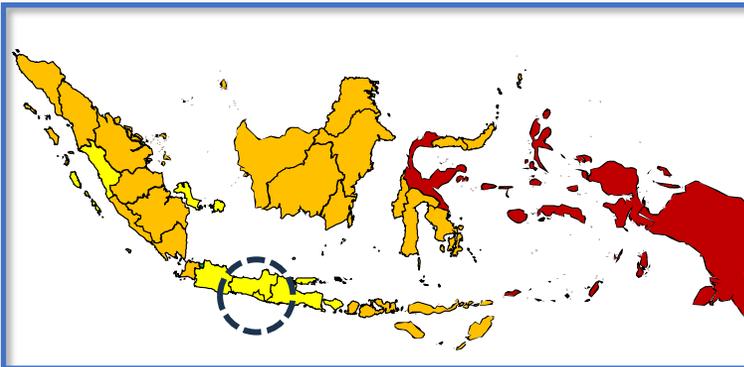
## Highlight Capaian

- Capaian implementasi SPBE di Provinsi DI Yogyakarta **mengalami peningkatan signifikan** dari tahun ke tahun.
- Saat ini rata-rata Indeks SPBE di Provinsi DI Yogyakarta pada kategori **Sangat Baik** dengan **Indeks 4,06**



2022

2023



Predikat  
SPBE

Memuaskan

Sangat Baik

Baik

Cukup

Kurang

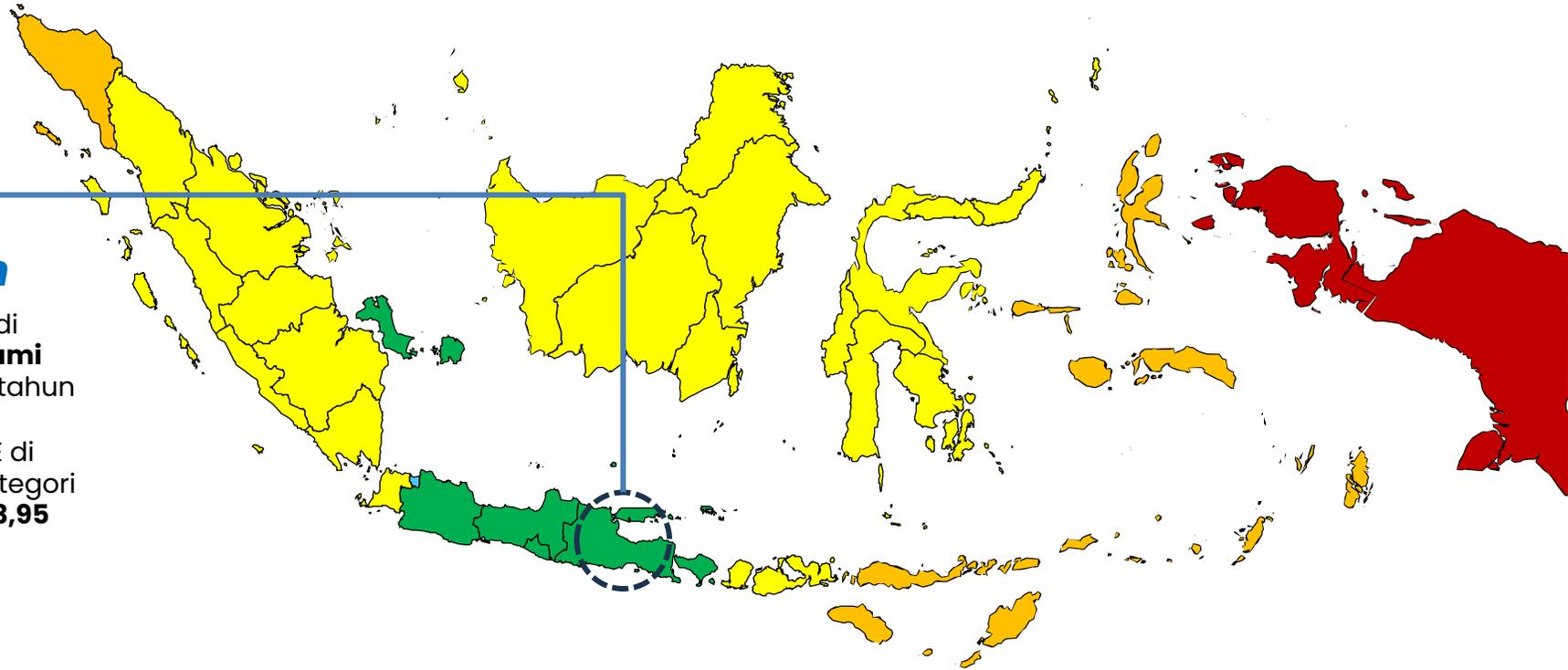
PEMERINTAH DAERAH	MEMUASKAN (4,2 – 5,0)	SANGAT BAIK (3,5 – < 4,5)	BAIK (2,6 – < 3,5)	CUKUP (1,8 – < 2,6)	KURANG (1,8 – < 2,6)	JUMLAH
<b>Provinsi</b>	1	-	-	-	-	<b>1</b>
<b>Kabupaten</b>	1	3	-	-	-	<b>4</b>
<b>Kota</b>	-	1	-	-	-	<b>1</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6</b>

No	Nama Instansi	Aspek 1	Aspek 2	Aspek 3	Aspek 4	Aspek 5	Aspek 6	Aspek 7	Aspek 8	Domain 1	Domain 2	Domain 3	Domain 4	Indeks	Predikat
1	Pemerintah D.I. Yogyakarta	5,00	4,50	5,00	5,00	3,88	3,00	4,30	5,00	5,00	4,80	3,64	4,58	4,53	Memuaskan
2	Pemerintah Kab. Sleman	4,20	3,75	4,75	4,00	3,38	3,00	4,80	4,67	4,20	4,20	3,27	4,75	4,30	Memuaskan
3	Pemerintah Kab. Bantul	4,00	3,25	4,00	4,00	3,00	3,33	4,80	5,00	4,00	3,70	3,09	4,88	4,18	Sangat Baik
4	Pemerintah Kab. Gunungkidul	4,40	3,00	3,75	3,00	2,38	2,67	4,70	4,83	4,40	3,30	2,45	4,75	3,96	Sangat Baik
5	Pemerintah Kab. Kulon Progo	4,40	3,50	4,00	4,00	3,38	3,00	4,10	4,00	4,40	3,80	3,27	4,06	3,91	Sangat Baik
6	Pemerintah Kota Yogyakarta	4,00	2,25	3,75	3,00	1,88	1,00	4,40	4,17	4,00	3,00	1,64	4,31	3,50	Sangat Baik

# SEBARAN RATA-RATA PREDIKAT INDEKS SPBE WILAYAH JAWA TIMUR TAHUN 2024

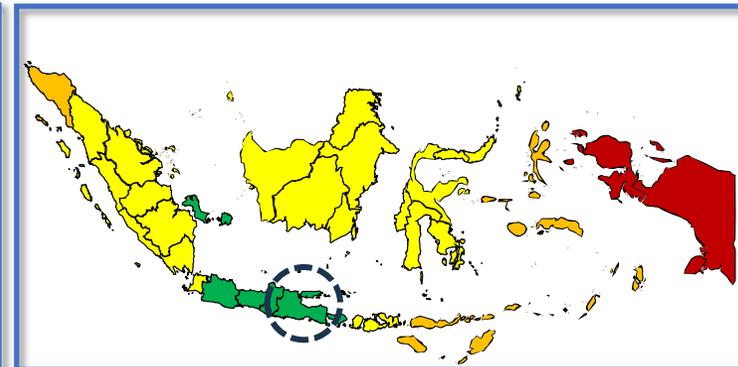
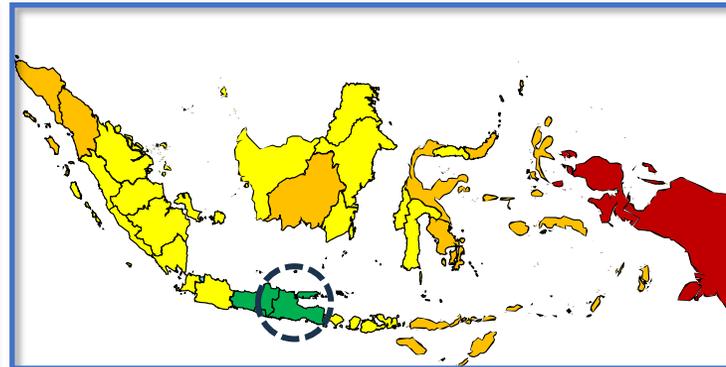
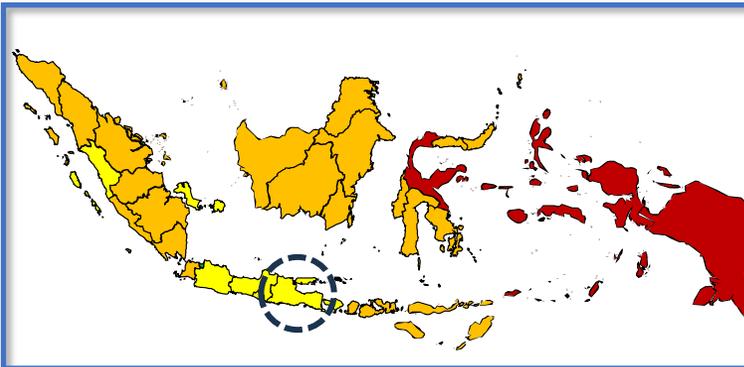
## Highlight Capaian

- Capaian implementasi SPBE di Provinsi Jawa Timur **mengalami peningkatan signifikan** dari tahun ke tahun.
- Saat ini rata-rata Indeks SPBE di Provinsi Jawa Timur pada kategori **Sangat Baik** dengan **Indeks 3,95**



2022

2023



Predikat  
SPBE

Memuaskan

Sangat Baik

Baik

Cukup

Kurang

# CAPAIAN INDEKS SPBE PEMERINTAH DAERAH DI JAWA TIMUR

PEMERINTAH DAERAH	MEMUASKAN (4,2 – 5,0)	SANGAT BAIK (3,5 – < 4,5)	BAIK (2,6 – < 3,5)	CUKUP (1,8 – < 2,6)	KURANG (1,8 – < 2,6)	JUMLAH
<b>Provinsi</b>	1	-	-	-	-	<b>1</b>
<b>Kabupaten</b>	7	18	4	-	-	<b>29</b>
<b>Kota</b>	4	5	-	-	-	<b>9</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>23</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>39</b>

No	Nama Instansi	Aspek 1	Aspek 2	Aspek 3	Aspek 4	Aspek 5	Aspek 6	Aspek 7	Aspek 8	Domain 1	Domain 2	Domain 3	Domain 4	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Kab. Banyuwangi	5,00	4,75	4,50	4,50	4,38	3,67	5,00	5,00	5,00	4,60	4,18	5,00	4,77	Memuaskan
2	Pemerintah Kab. Kediri	5,00	3,50	4,25	5,00	4,38	3,33	5,00	5,00	5,00	4,10	4,09	5,00	4,63	Memuaskan
3	Pemerintah Kota Madiun	4,80	3,75	5,00	5,00	4,13	3,00	4,70	5,00	4,80	4,50	3,82	4,82	4,57	Memuaskan
4	Pemerintah Kota Surabaya	5,00	4,50	4,50	5,00	2,75	3,00	5,00	5,00	5,00	4,60	2,82	5,00	4,54	Memuaskan
5	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	4,60	3,75	4,75	5,00	3,13	3,00	4,90	4,83	4,60	4,40	3,09	4,87	4,43	Memuaskan
6	Pemerintah Kab. Gresik	5,00	3,25	4,00	4,00	3,38	2,67	4,80	5,00	5,00	3,70	3,18	4,88	4,32	Memuaskan
7	Pemerintah Kota Mojokerto	5,00	3,00	4,00	5,00	3,13	2,67	4,80	5,00	5,00	3,80	3,00	4,88	4,32	Memuaskan
8	Pemerintah Kab. Madiun	5,00	3,00	4,50	5,00	3,50	1,67	4,60	5,00	5,00	4,00	3,00	4,76	4,31	Memuaskan
9	Pemerintah Kota Malang	4,70	3,75	4,50	5,00	3,13	1,00	4,60	4,83	4,70	4,30	2,55	4,69	4,24	Memuaskan
10	Pemerintah Kab. Tuban	4,70	3,75	4,25	3,50	2,75	2,33	4,90	4,83	4,70	3,90	2,64	4,87	4,24	Memuaskan
11	Pemerintah Kab. Trenggalek	4,80	4,00	4,00	3,00	2,88	3,00	4,60	5,00	4,80	3,80	2,91	4,76	4,22	Memuaskan
12	Pemerintah Kab. Situbondo	4,70	2,75	5,00	5,00	3,00	1,67	4,60	4,83	4,70	4,10	2,64	4,69	4,21	Memuaskan
13	Pemerintah Kab. Lamongan	5,00	3,50	3,25	3,50	2,38	2,67	5,00	5,00	5,00	3,40	2,45	5,00	4,18	Sangat Baik
14	Pemerintah Kab. Mojokerto	4,50	3,50	4,25	3,50	2,88	2,67	4,80	4,67	4,50	3,80	2,82	4,75	4,16	Sangat Baik
15	Pemerintah Kab. Bojonegoro	4,60	3,50	5,00	3,50	2,75	2,33	4,40	4,83	4,60	4,10	2,64	4,57	4,14	Sangat Baik

# CAPAIAN INDEKS SPBE PEMERINTAH DAERAH DI JAWA TIMUR

No	Nama Instansi	Aspek 1	Aspek 2	Aspek 3	Aspek 4	Aspek 5	Aspek 6	Aspek 7	Aspek 8	Domain 1	Domain 2	Domain 3	Domain 4	Indeks	Predikat
16	Pemerintah Kota Blitar	4,30	3,25	3,00	4,50	3,38	3,00	4,60	5,00	4,30	3,40	3,27	4,76	4,11	Sangat Baik
17	Pemerintah Kota Pasuruan	4,90	3,25	3,50	3,50	2,75	2,67	4,50	5,00	4,90	3,40	2,73	4,70	4,07	Sangat Baik
18	Pemerintah Kota Probolinggo	4,10	3,75	3,75	4,00	2,88	2,33	4,50	4,83	4,10	3,80	2,73	4,63	4,04	Sangat Baik
19	Pemerintah Kab. Probolinggo	4,40	3,75	4,00	3,00	2,38	1,67	4,40	5,00	4,40	3,70	2,18	4,64	3,97	Sangat Baik
20	Pemerintah Kab. Sidoarjo	4,80	3,00	3,00	3,00	2,63	3,00	4,50	5,00	4,80	3,00	2,73	4,70	3,96	Sangat Baik
21	Pemerintah Kab. Pamekasan	5,00	4,25	4,50	4,50	3,38	2,00	3,80	3,50	5,00	4,40	3,00	3,68	3,92	Sangat Baik
22	Pemerintah Kab. Jombang	3,90	4,25	3,50	5,00	3,50	3,00	4,00	4,00	3,90	4,10	3,36	4,00	3,91	Sangat Baik
23	Pemerintah Kota Kediri	3,80	3,50	3,75	4,50	2,50	2,67	4,30	4,67	3,80	3,80	2,55	4,45	3,89	Sangat Baik
24	Pemerintah Kab. Pasuruan	5,00	2,00	4,50	4,00	2,13	1,00	4,50	4,67	5,00	3,40	1,82	4,57	3,88	Sangat Baik
25	Pemerintah Kab. Bondowoso	4,00	3,75	4,50	4,50	3,00	3,00	3,70	4,33	4,00	4,20	3,00	3,95	3,86	Sangat Baik
26	Pemerintah Kab. Nganjuk	4,70	2,75	5,00	4,50	2,75	1,67	3,70	4,50	4,70	4,00	2,45	4,02	3,84	Sangat Baik
27	Pemerintah Kab. Tulungagung	3,50	3,25	4,50	3,00	2,25	1,00	4,30	5,00	3,50	3,70	1,91	4,58	3,78	Sangat Baik
28	Pemerintah Kab. Blitar	4,60	2,25	3,75	3,00	3,00	3,33	4,00	4,50	4,60	3,00	3,09	4,20	3,77	Sangat Baik
29	Pemerintah Kab. Malang	3,90	3,50	3,75	2,50	1,75	1,67	4,80	4,33	3,90	3,40	1,73	4,62	3,74	Sangat Baik
30	Pemerintah Kab. Sumenep	4,20	2,75	3,00	4,00	3,13	2,00	4,00	4,67	4,20	3,10	2,82	4,26	3,73	Sangat Baik

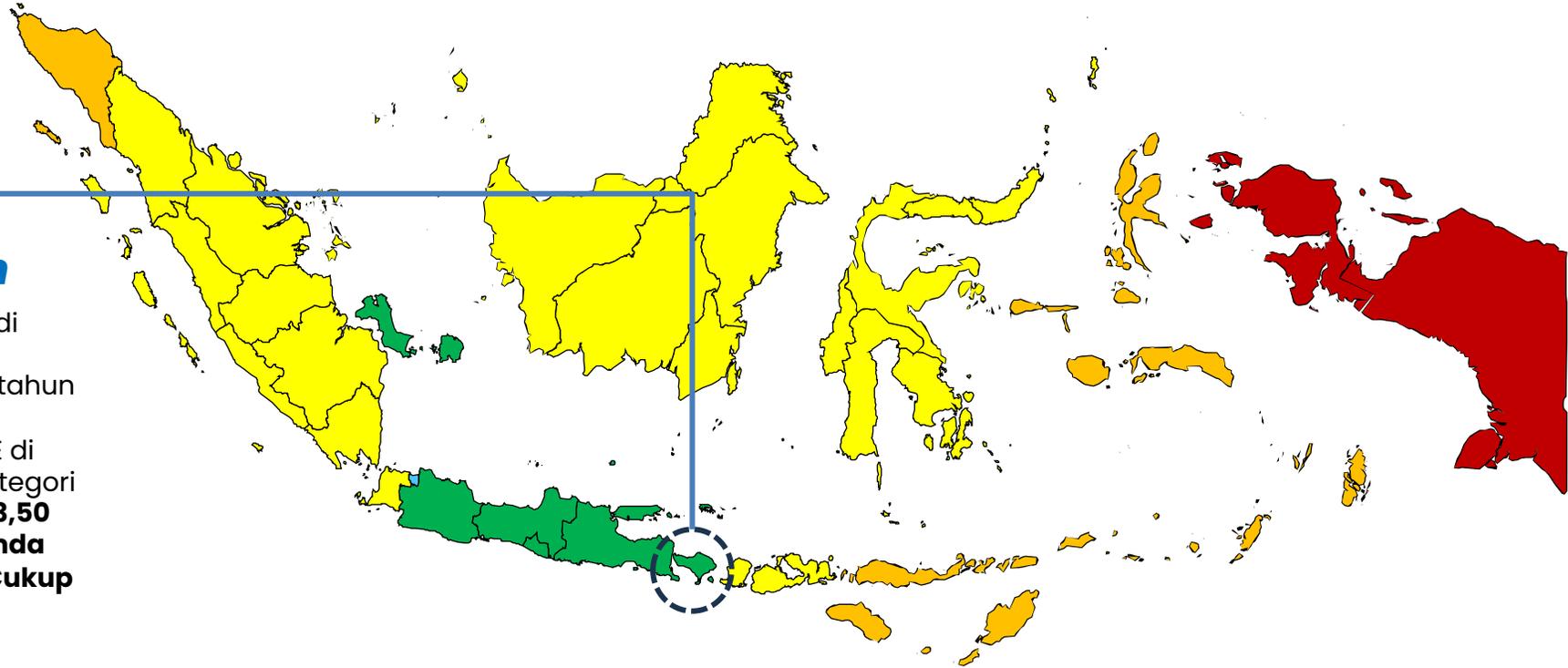
# CAPAIAN INDEKS SPBE PEMERINTAH DAERAH DI JAWA TIMUR

No	Nama Instansi	Aspek 1	Aspek 2	Aspek 3	Aspek 4	Aspek 5	Aspek 6	Aspek 7	Aspek 8	Domain 1	Domain 2	Domain 3	Domain 4	Indeks	Predikat
31	Pemerintah Kab. Sampang	3,60	2,75	3,50	2,50	2,00	2,33	4,40	5,00	3,60	3,00	2,09	4,64	3,67	Sangat Baik
32	Pemerintah Kab. Ngawi	4,80	3,00	3,50	3,00	1,75	2,00	3,80	4,67	4,80	3,20	1,82	4,14	3,61	Sangat Baik
33	Pemerintah Kota Batu	3,70	3,50	3,25	3,50	2,50	2,00	3,90	4,33	3,70	3,40	2,36	4,07	3,57	Sangat Baik
34	Pemerintah Kab. Jember	3,20	2,75	2,50	4,00	2,75	3,00	4,10	4,50	3,20	2,90	2,82	4,26	3,54	Sangat Baik
35	Pemerintah Kab. Pacitan	4,70	3,75	2,25	3,00	2,13	2,00	3,90	4,00	4,70	3,00	2,09	3,94	3,50	Sangat Baik
36	Pemerintah Kab. Lumajang	3,20	1,50	2,75	3,00	1,75	1,67	4,40	5,00	3,20	2,30	1,73	4,64	3,39	Baik
37	Pemerintah Kab. Ponorogo	3,00	2,25	2,75	3,00	1,63	1,00	3,90	4,00	3,00	2,60	1,45	3,94	3,07	Baik
38	Pemerintah Kab. Magetan	2,30	1,75	2,75	3,00	1,25	1,00	3,80	4,33	2,30	2,40	1,18	4,01	2,92	Baik
39	Pemerintah Kab. Bangkalan	2,60	2,25	2,75	2,50	2,25	1,33	3,40	3,83	2,60	2,50	2,00	3,57	2,92	Baik

# SEBARAN RATA-RATA PREDIKAT INDEKS SPBE WILAYAH BALI TAHUN 2024

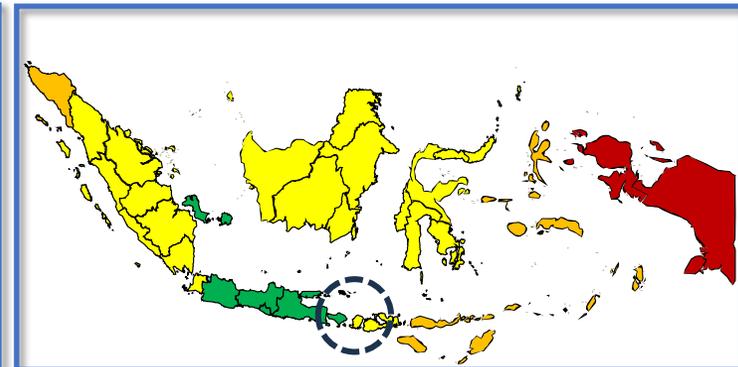
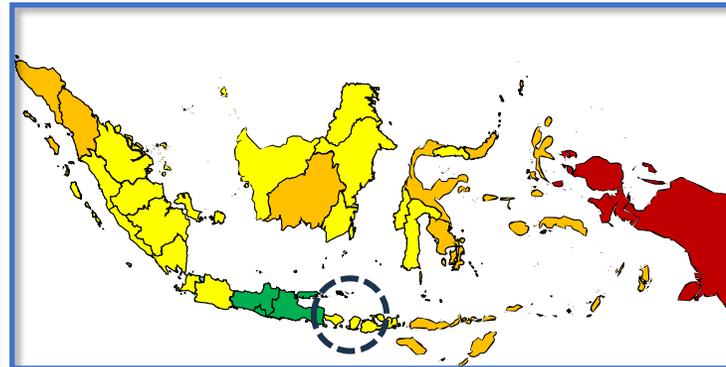
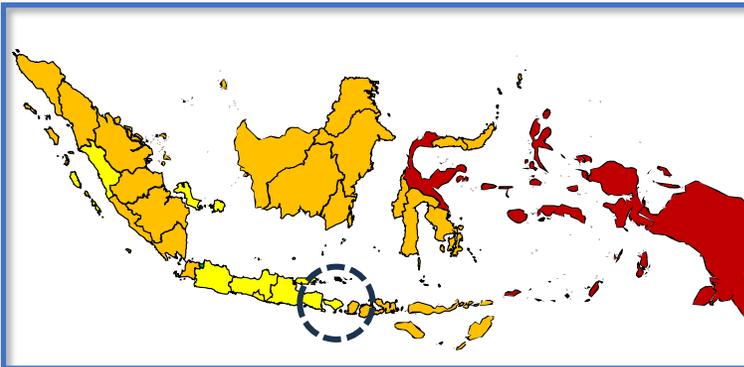
## Highlight Capaian

- Capaian implementasi SPBE di Provinsi Bali **mengalami peningkatan signifikan** dari tahun ke tahun.
- Saat ini rata-rata Indeks SPBE di Provinsi Jawa Timur pada kategori **Sangat Baik** dengan **Indeks 3,50**
- Namun, masih terdapat Pemda yang memiliki Indeks SPBE Cukup



2022

2023



Predikat SPBE

Memuaskan

Sangat Baik

Baik

Cukup

Kurang

# CAPAIAN INDEKS SPBE PEMERINTAH DAERAH DI BALI

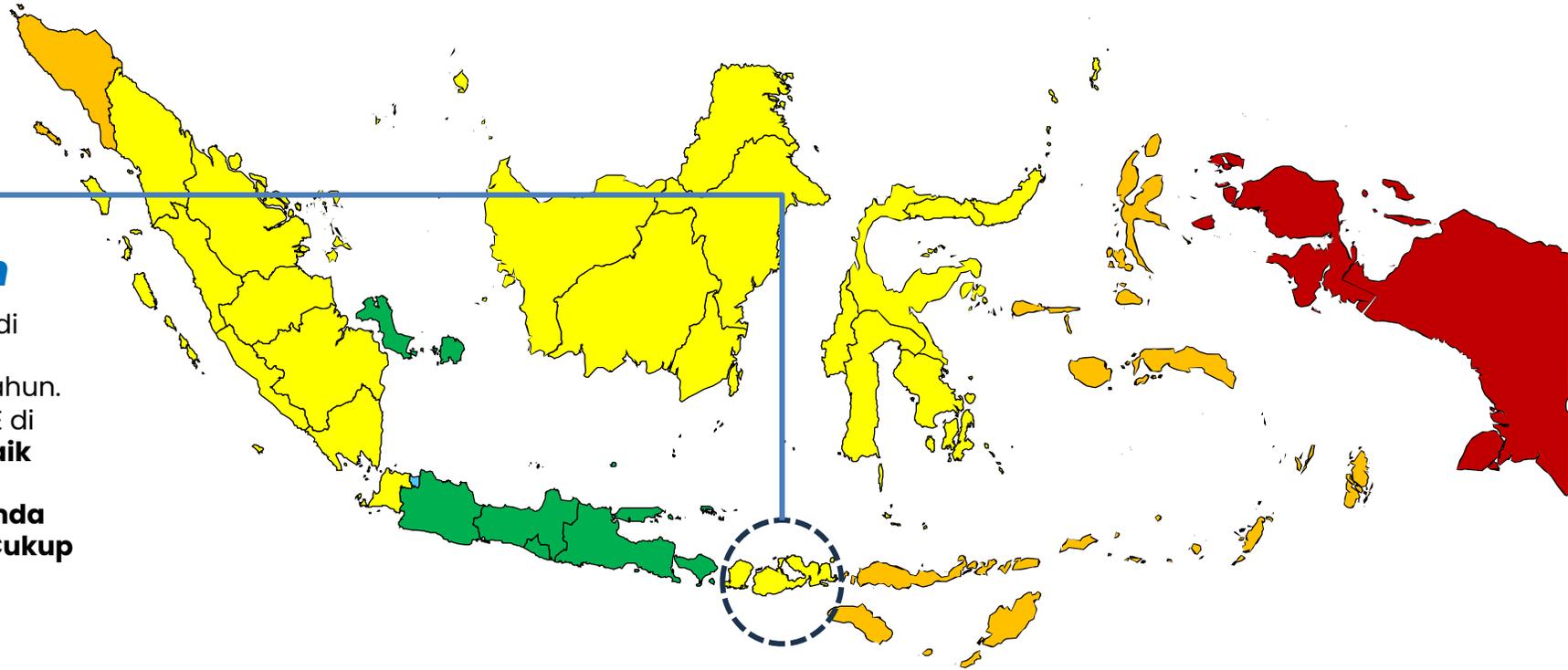
PEMERINTAH DAERAH	MEMUASKAN (4,2 – 5,0)	SANGAT BAIK (3,5 – < 4,5)	BAIK (2,6 – < 3,5)	CUKUP (1,8 – < 2,6)	KURANG (1,8 – < 2,6)	JUMLAH
<b>Provinsi</b>	1	-	-	-	-	<b>1</b>
<b>Kabupaten</b>	-	4	3	1	-	<b>8</b>
<b>Kota</b>	-	1	-	-	-	<b>1</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>10</b>

No	Nama Instansi	Aspek 1	Aspek 2	Aspek 3	Aspek 4	Aspek 5	Aspek 6	Aspek 7	Aspek 8	Domain 1	Domain 2	Domain 3	Domain 4	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Bali	4,80	4,00	3,75	4,50	3,63	3,67	4,40	4,83	4,80	4,00	3,64	4,57	4,30	Memuaskan
2	Pemerintah Kota Denpasar	4,10	3,00	4,50	4,50	3,50	2,67	3,90	4,67	4,10	3,90	3,27	4,20	3,96	Sangat Baik
3	Pemerintah Kab. Badung	4,70	3,00	3,25	3,00	2,25	3,00	4,40	4,83	4,70	3,10	2,45	4,57	3,87	Sangat Baik
4	Pemerintah Kab. Jembrana	4,30	4,00	3,50	4,00	2,25	3,00	3,80	4,50	4,30	3,80	2,45	4,08	3,77	Sangat Baik
5	Pemerintah Kab. Buleleng	3,70	2,75	4,00	4,00	2,63	1,67	4,00	4,67	3,70	3,50	2,36	4,26	3,69	Sangat Baik
6	Pemerintah Kab. Tabanan	3,70	3,50	2,75	3,50	2,13	2,67	3,90	4,50	3,70	3,20	2,27	4,14	3,54	Sangat Baik
7	Pemerintah Kab. Gianyar	3,10	2,75	3,25	3,00	2,63	3,00	3,80	4,67	3,10	3,00	2,73	4,14	3,49	Baik
8	Pemerintah Kab. Klungkung	3,10	2,50	3,00	4,50	2,00	1,00	3,60	3,83	3,10	3,10	1,73	3,69	3,14	Baik
9	Pemerintah Kab. Bangli	2,20	1,75	2,00	2,50	1,13	1,00	3,60	4,17	2,20	2,00	1,09	3,82	2,71	Baik
10	Pemerintah Kab. Karangasem	2,70	2,50	1,75	1,00	1,75	1,00	2,90	3,83	2,70	1,90	1,55	3,27	2,57	Cukup

# SEBARAN RATA-RATA PREDIKAT INDEKS SPBE WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024

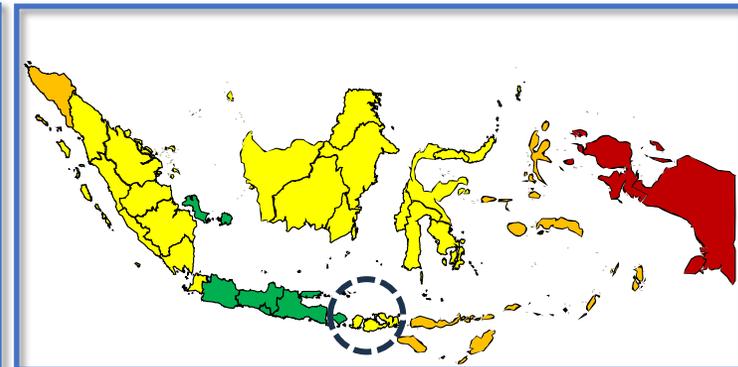
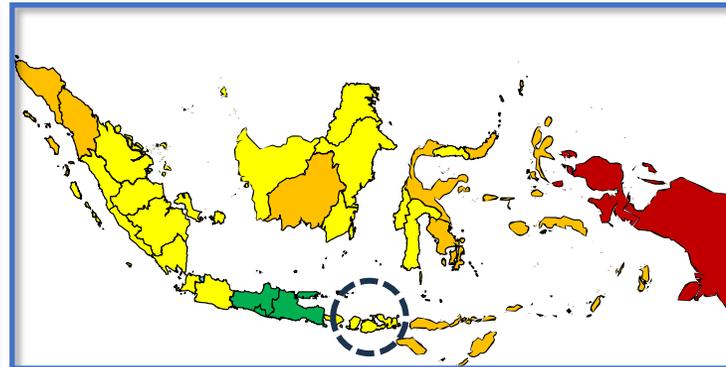
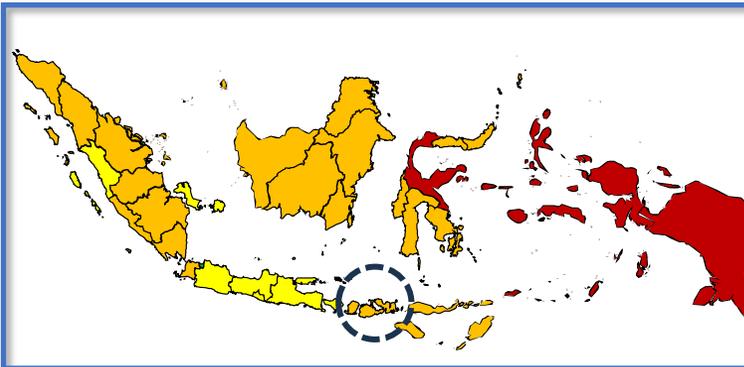
## Highlight Capaian

- Capaian implementasi SPBE di Provinsi NTB mengalami **peningkatan** dari tahun ke tahun.
- Saat ini rata-rata Indeks SPBE di Provinsi NTB pada kategori **Baik** dengan **Indeks 3,02**
- **Namun, masih terdapat Pemda yang memiliki Indeks SPBE Cukup**



2022

2023



Predikat  
SPBE

Memuaskan

Sangat Baik

Baik

Cukup

Kurang

PEMERINTAH DAERAH	MEMUASKAN (4,2 – 5,0)	SANGAT BAIK (3,5 – < 4,5)	BAIK (2,6 – < 3,5)	CUKUP (1,8 – < 2,6)	KURANG (1,8 – < 2,6)	JUMLAH
<b>Provinsi</b>	-	1	-	-	-	<b>1</b>
<b>Kabupaten</b>	-	-	6	2	-	<b>8</b>
<b>Kota</b>	-	1	1	-	-	<b>2</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>11</b>

No	Nama Instansi	Aspek 1	Aspek 2	Aspek 3	Aspek 4	Aspek 5	Aspek 6	Aspek 7	Aspek 8	Domain 1	Domain 2	Domain 3	Domain 4	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	3,10	2,75	3,25	4,00	2,88	3,00	4,10	4,17	3,10	3,20	2,91	4,13	3,56	Sangat Baik
2	Pemerintah Kota Mataram	3,30	3,00	3,25	3,50	3,25	3,00	3,60	4,50	3,30	3,20	3,18	3,96	3,55	Sangat Baik
3	Pemerintah Kab. Sumbawa Barat	4,10	3,00	2,50	2,50	2,75	2,00	3,90	4,17	4,10	2,70	2,55	4,01	3,45	Baik
4	Pemerintah Kab. Lombok Timur	3,00	3,25	3,00	4,00	1,63	1,33	3,80	4,17	3,00	3,30	1,55	3,95	3,27	Baik
5	Pemerintah Kab. Lombok Barat	3,20	2,50	1,50	3,00	2,13	2,00	3,60	4,17	3,20	2,20	2,09	3,82	3,05	Baik
6	Pemerintah Kab. Lombok Tengah	3,70	2,25	2,75	2,50	1,00	1,00	3,80	4,00	3,70	2,50	1,00	3,88	3,04	Baik
7	Pemerintah Kab. Sumbawa	3,70	2,00	3,00	2,50	1,00	1,00	3,40	3,83	3,70	2,50	1,00	3,57	2,90	Baik
8	Pemerintah Kab. Lombok Utara	3,00	2,00	1,75	2,00	1,00	1,00	3,70	3,67	3,00	1,90	1,00	3,69	2,71	Baik
9	Pemerintah Kota Bima	2,40	1,50	2,00	2,50	1,00	1,00	3,60	4,00	2,40	1,90	1,00	3,76	2,66	Baik
10	Pemerintah Kab. Bima	2,90	2,00	1,75	1,50	1,25	1,00	3,50	3,00	2,90	1,80	1,18	3,30	2,52	Cukup
11	Pemerintah Kab. Dompu	2,50	1,75	2,00	1,50	1,63	1,00	3,60	2,83	2,50	1,80	1,45	3,30	2,52	Cukup



PEMERINTAH DAERAH	MEMUASKAN (4,2 – 5,0)	SANGAT BAIK (3,5 – < 4,5)	BAIK (2,6 – < 3,5)	CUKUP (1,8 – < 2,6)	KURANG (1,8 – < 2,6)	JUMLAH
<b>Provinsi</b>	-	1	-	-	-	<b>1</b>
<b>Kabupaten</b>	-	-	6	14	1	<b>21</b>
<b>Kota</b>	-	-	1	-	-	<b>1</b>
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>23</b>

No	Nama Instansi	Aspek 1	Aspek 2	Aspek 3	Aspek 4	Aspek 5	Aspek 6	Aspek 7	Aspek 8	Domain 1	Domain 2	Domain 3	Domain 4	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	4,70	3,00	3,00	4,00	3,25	2,67	4,00	4,83	4,70	3,20	3,09	4,33	3,89	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Manggarai Barat	3,90	2,50	3,50	3,50	2,63	3,00	3,70	4,00	3,90	3,10	2,73	3,82	3,47	Baik
3	Pemerintah Kab. Rote Ndao	5,00	2,00	2,50	4,00	1,88	2,00	3,70	4,00	5,00	2,60	1,91	3,82	3,35	Baik
4	Pemerintah Kota Kupang	4,20	2,00	2,75	3,50	1,50	2,00	3,70	3,67	4,20	2,60	1,64	3,69	3,14	Baik
5	Pemerintah Kab. Sumba Barat	4,40	1,25	2,50	4,00	1,13	1,00	3,80	4,17	4,40	2,30	1,09	3,95	3,12	Baik
6	Pemerintah Kab. Manggarai	3,00	2,50	1,50	2,00	1,88	1,00	3,80	3,83	3,00	2,00	1,64	3,81	2,90	Baik
7	Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan	2,80	2,50	2,00	2,00	1,13	1,00	3,70	4,00	2,80	2,20	1,09	3,82	2,83	Baik
8	Pemerintah Kab. Manggarai Timur	3,00	1,75	1,25	2,50	1,13	1,00	3,80	3,33	3,00	1,70	1,09	3,62	2,64	Baik
9	Pemerintah Kab. Ende	3,00	1,25	2,00	1,00	1,00	1,00	3,70	3,50	3,00	1,50	1,00	3,62	2,58	Cukup
10	Pemerintah Kab. Sumba Timur	3,00	1,00	1,50	2,50	1,00	1,00	3,30	4,00	3,00	1,50	1,00	3,58	2,56	Cukup
11	Pemerintah Kab. Kupang	1,70	2,00	1,50	2,50	1,13	1,33	3,50	3,50	1,70	1,90	1,18	3,50	2,48	Cukup
12	Pemerintah Kab. Belu	3,50	1,00	1,50	2,50	1,00	1,00	3,30	3,17	3,50	1,50	1,00	3,25	2,47	Cukup
13	Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara	2,50	1,00	1,25	2,50	1,00	1,00	3,50	3,50	2,50	1,40	1,00	3,50	2,43	Cukup
14	Pemerintah Kab. Lembata	2,90	1,50	1,75	1,00	1,00	1,00	3,30	3,33	2,90	1,50	1,00	3,31	2,42	Cukup
15	Pemerintah Kab. Alor	2,40	1,00	1,25	1,50	1,00	1,00	3,40	2,67	2,40	1,20	1,00	3,11	2,19	Cukup

PEMERINTAH DAERAH	MEMUASKAN (4,2 – 5,0)	SANGAT BAIK (3,5 – < 4,5)	BAIK (2,6 – < 3,5)	CUKUP (1,8 – < 2,6)	KURANG (1,8 – < 2,6)	JUMLAH
Provinsi	-	1	-	-	-	1
Kabupaten	-	-	6	14	1	21
Kota	-	-	1	-	-	1
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>23</b>

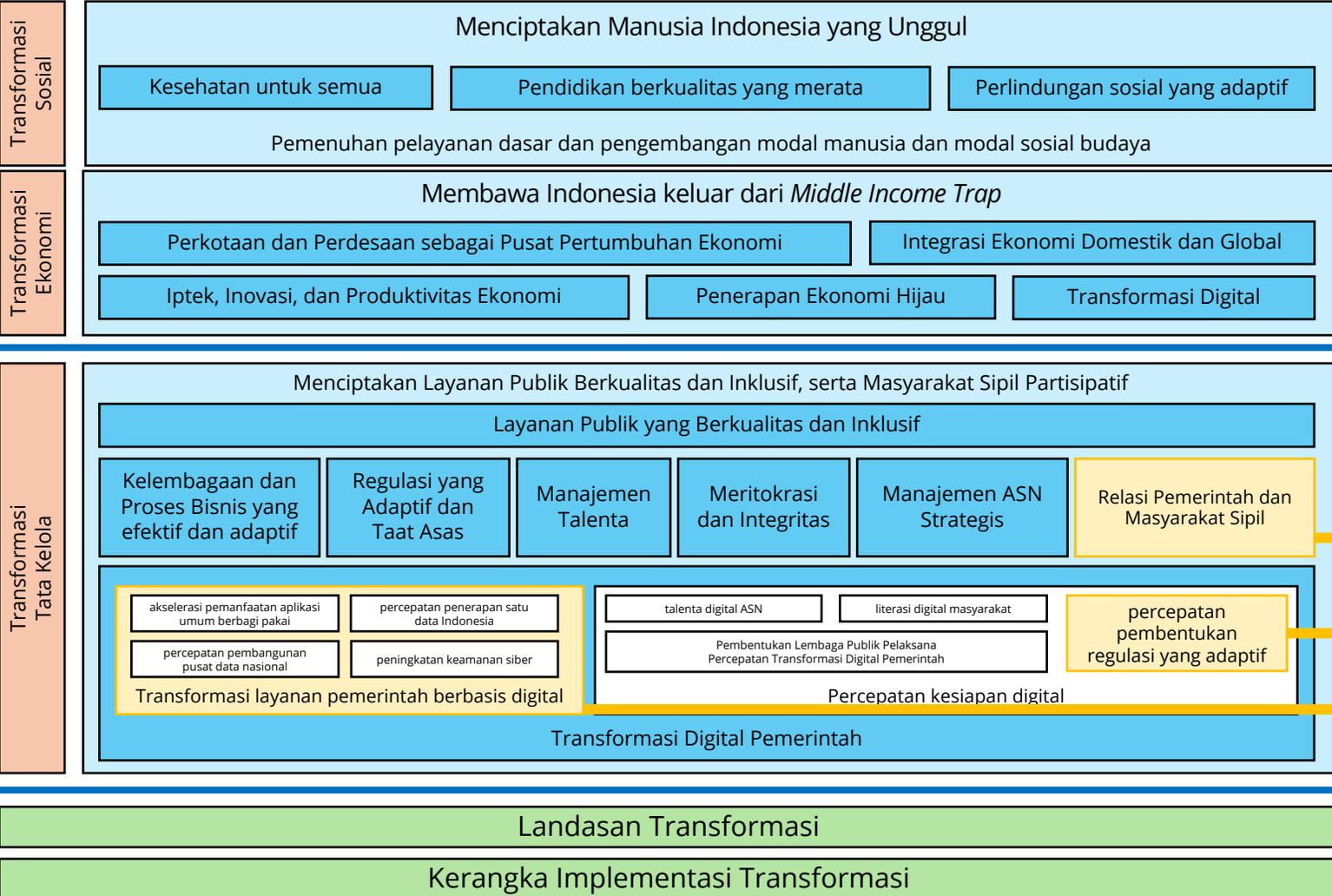
No	Nama Instansi	Aspek 1	Aspek 2	Aspek 3	Aspek 4	Aspek 5	Aspek 6	Aspek 7	Aspek 8	Domain 1	Domain 2	Domain 3	Domain 4	Indeks	Predikat
16	Pemerintah Kab. Sumba Tengah	3,00	1,25	1,75	1,50	1,13	1,00	3,10	2,17	3,00	1,50	1,09	2,73	2,19	Cukup
17	Pemerintah Kab. Malaka	2,20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,50	2,83	2,20	1,00	1,00	3,24	2,17	Cukup
18	Pemerintah Kab. Ngada	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,90	3,17	3,00	1,00	1,00	3,01	2,17	Cukup
19	Pemerintah Kab. Flores Timur	1,20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,70	2,83	1,20	1,00	1,00	3,36	2,10	Cukup
20	Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya	1,10	1,00	1,00	1,50	1,00	1,00	3,20	3,17	1,10	1,10	1,00	3,19	2,03	Cukup
21	Pemerintah Kab. Sikka	2,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,80	2,83	2,50	1,00	1,00	2,81	2,02	Cukup
22	Pemerintah Kab. Sabu Raijua	4,60	1,50	1,50	1,50	1,13	1,00	1,40	1,67	4,60	1,50	1,09	1,51	1,84	Cukup
23	Pemerintah Kab. Nagekeo	2,60	1,25	1,00	1,00	1,00	1,00	2,40	1,83	2,60	1,10	1,00	2,18	1,77	Kurang

# Transformasi Indonesia

## untuk Mencapai Tujuan Pembangunan

Disarikan dari UU 59/2024  
RPJPN 2025 - 2045

### Indonesia Emas 2045



**Transformasi Tata Kelola sebagai bagian penting Transformasi Indonesia** merupakan amanat pelaksanaan UU No 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045

Arah pembangunan Transformasi Tata Kelola: **Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.**

**Terdiri dari:**

1. Layanan pemerintah
2. Kelembagaan yang efektif
3. Proses bisnis yang adaptif
4. Manajemen talenta
5. Meritokrasi dan integritas
6. Manajemen ASN strategis
7. Relasi pemerintah dan masyarakat sipil

### 8. Transformasi digital pemerintah

3 amanat tertulis dalam RPJPN 2025-2045:  
**Percepatan kesiapan digital** melalui **percepatan pembentukan regulasi yang adaptif**, mendukung penguatan **relasi pemerintah dan masyarakat sipil** serta **Transformasi Layanan Pemerintah Berbasis Digital**



## Perpres 12/2025 tentang RPJMN 2025 - 2029

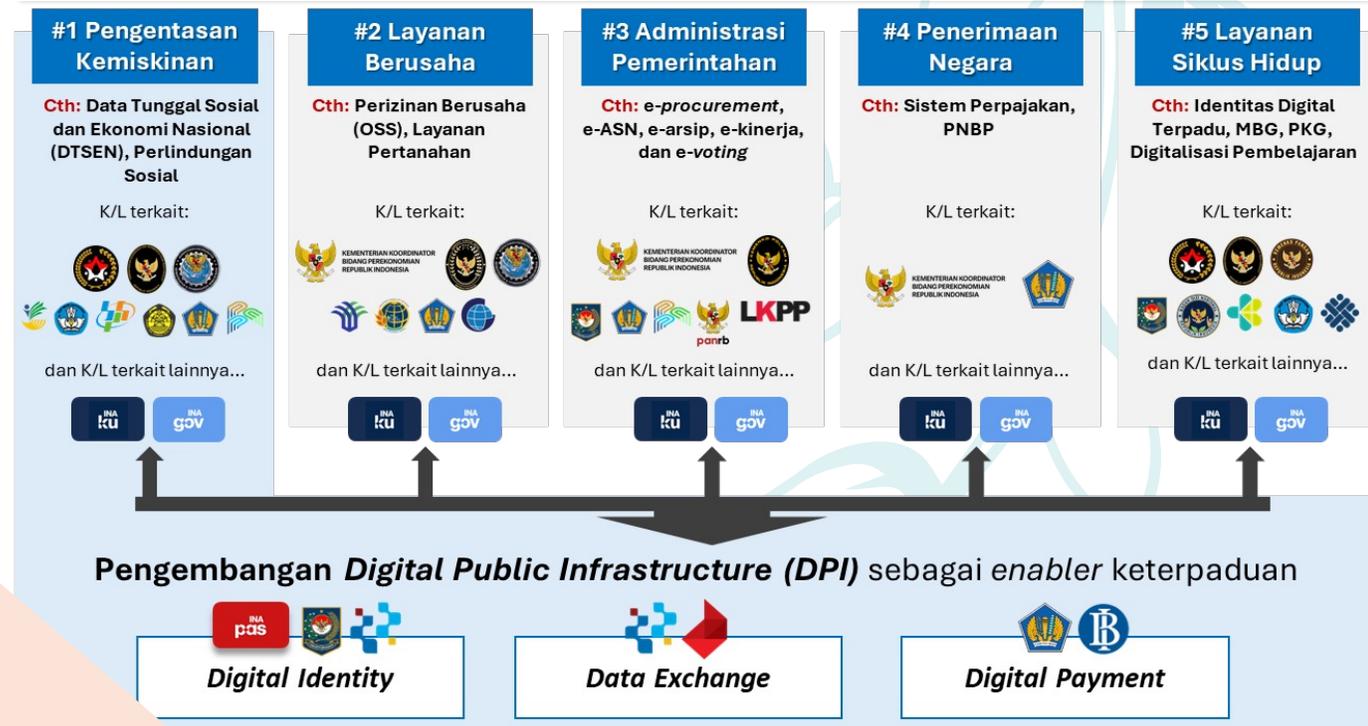
## PSN #37 – Koordinator KemenPANRB “Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu”

Visualisasi program prioritas dan PSN terkait Pemerintah Digital dalam RPJMN berupa **Digital Public Infrastructure (DPI)** dan **Use Case Prioritas**

Pemerintah Digital mewujudkan kesuksesan program prioritas nasional (MBG, PKG, Koperasi MP, DTSEN, Tax Ratio, Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, dll)

### Peran Pemerintah Digital sebagai pengungkit pembangunan:

- 1 Mendukung penurunan kemiskinan melalui penguatan tata kelola data pemerintah yang terpadu, sehingga pengelola program perlindungan social dapat lebih efektif dan tepat sasaran. Didukung kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) untuk memastikan penyaluran manfaat kepada kelompok yang membutuhkan secara efisien.
- 2 Pemerintah digital berperan dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif berbasis teknologi. Proses perizinan yang transparan, cepat, dan akurat mendorong investasi baru, meningkatkan daya saing ekonomi, dan membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat.
- 3 Sistem pengadaan berbasis elektronik yang lebih baik dan maju, sistematis, serta terintegrasi dapat menciptakan transparansi dan keterbukaan dalam pengadaan barang/jasa.
- 4 Modernisasi teknologi sistem perpajakan dapat memberikan banyak manfaat sebagai upaya meningkatkan rasio pajak, meminimalisasi penghindaran dan penggelapan pajak, serta mendorong kepatuhan wajib pajak.
- 5 Pemerintah digital berperan sebagai pengungkit pembangunan melalui transformasi layanan publik yang berfokus pada kebutuhan masyarakat di setiap tahap kehidupan. Melalui pengembangan platform layanan publik terpadu, pemerintah mempermudah akses masyarakat terhadap layanan penting, seperti pendidikan dan kesehatan. Sistem yang terintegrasi ini memastikan layanan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan responsif, sehingga berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.



## Sinkronisasi Fokus/Use Case Prioritas

# Program Prioritas (PP) Pemerintah Digital di RPJMN 2025–2029

**Pembangunan nasional perlu mengadopsi praktik terbaik dalam tata kelola sektor publik.**



Birokrasi yang lincah (*agile*)



Dalam horizon berpikir luas lintas batas (*thinking across*)



Adaptif, bervisi melampaui zamannya (*thinking ahead*), secara terus menerus (*thinking again*)



Pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence based*)



didukung dengan data terintegrasi (*integrated big-data*)

RPJMN 2025– 2029 menjadi pijakan strategis dalam mewujudkan penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta berkelanjutan.

**Diperlukan fondasi yang kokoh melalui reformasi birokrasi yang menyeluruh, didukung transformasi digital sebagai elemen kunci.**



program pemerintah digital diharapkan tercipta fondasi yang kuat untuk mendukung reformasi birokrasi dan tata kelola yang lebih baik. Dengan teknologi yang andal, data yang terintegrasi, kompetensi sumber daya manusia yang tinggi, serta layanan publik yang modern, pemerintah digital memberikan kontribusi nyata pada pencapaian tujuan utama pembangunan nasional

Penguatan tata kelola pemerintah digital menjadi langkah utama meliputi penyusunan kebijakan digital yang terintegrasi, pengembangan arsitektur sistem digital pemerintahan, dan evaluasi berkelanjutan atas kinerja sistem yang ada

pembangunan sumber daya manusia yang kompeten dan berbudaya digital menjadi aspek fundamental, dengan fokus pada pelatihan berbasis teknologi, dan pengelolaan layanan digital secara profesional.

Transformasi digital layanan publik dalam pemerintah digital diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kepada masyarakat, terutama pada sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan perizinan berusaha. Layanan ini dirancang agar cepat, tepat, dan terjangkau

ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah. Data yang terintegrasi dan saling terhubung antarinstansi menjadi dasar pengambilan kebijakan berbasis bukti, perencanaan pembangunan yang lebih efektif, dan pengawasan anggaran yang lebih ketat.



## Pemerintah Digital

1. Penguatan Tata Kelola Pemerintah Digital
2. Penguatan Teknologi Pemerintah Digital
3. Pengembangan Budaya dan Kompetensi Digital ASN
4. Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas
5. Penguatan Ketersediaan dan Pemanfaatan Data

Mendukung penurunan kemiskinan melalui penguatan tata kelola data pemerintah yang terpadu sehingga pengelola program perlindungan sosial dapat lebih efektif dan tepat sasaran. Didukung oleh kebijakan Satu Data Indonesia untuk memastikan penyaluran manfaat kepada kelompok yang membutuhkan secara efisien.

Pemerintah digital berperan dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif berbasis teknologi. Proses perizinan yang transparan, cepat, dan akurat mendorong investasi baru, meningkatkan daya saing ekonomi, dan membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat.

Sistem pengadaan berbasis elektronik yang lebih baik dan maju, sistematis, serta terintegrasi dapat menciptakan transparansi dan keterbukaan dalam pengadaan barang/jasa.

Modernisasi teknologi sistem perpajakan dapat memberikan banyak manfaat sebagai upaya meningkatkan rasio pajak, meminimalisir penghindaran dan penggelapan pajak, serta mendorong kepatuhan wajib pajak.

Pemerintah digital berperan sebagai pengungkit pembangunan melalui transformasi layanan publik yang berfokus pada kebutuhan masyarakat di setiap tahap kehidupan. Melalui pengembangan platform layanan publik terpadu, pemerintah mempermudah akses masyarakat terhadap layanan penting, seperti pendidikan dan kesehatan. Sistem yang terintegrasi ini memastikan layanan yang lebih cepat, tepat sasaran, dan responsif, sehingga berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.



Perpres 12/2025 tentang RPJMN 2025 - 2029



## PP 07.10 Pemerintah Digital

Sasaran: Terwujudnya Pemerintahan berbasis Digitalisasi yang Transparan, Inklusif dan Efisien

### KP.07.10.01 Penguatan Tata Kelola Pemerintah Digital

**Sasaran:** Terwujudnya tata kelola pemerintahan digital yang transformatif

**Indikator:**

- Jumlah Kebijakan Pemerintah Digital yang ditetapkan
- Jumlah Lembaga yang menerapkan arsitektur pemerintah digital

**ProP:**

- Kebijakan Pemerintah Digital
- Kedaulatan Sistem Pemerintah Digital
- Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital
- Pengembangan Proses Bisnis Tematik dalam Arsitektur Pemerintah Digital

Stakeholders Terkait:



### KP.07.10.02 Penguatan Teknologi Pemerintah Digital

**Sasaran:** Tersedianya teknologi pemerintah digital yang berkualitas dan tangguh

**Indikator:**

- Persentase instansi K/L/Prov yang terhubung dengan JIP
- Persentase K/L/D yang mengimplementasikan SPLP

**ProP:**

- Penguatan Infrastruktur Pemerintah Digital
- Penguatan Aplikasi Pemerintah Digital
- Penguatan Keamanan Siber Pemerintah

Stakeholders Terkait:



### KP.07.10.03 Pengembangan Kompetensi dan Budaya Digital

**Sasaran:** Terwujudnya ASN yang berkompentensi dan berbudaya digital dalam pelaksanaan pemerintah digital

**Indikator:**

- Persentase ASN dengan kompetensi digital optimal

**ProP:**

- Pengembangan Budaya Digital ASN
- Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas Digital ASN
- Peningkatan Kompetensi ASN Pengelola Layanan Digital

Stakeholders Terkait:



### KP.07.10.04 Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas

**Sasaran:** Terselenggaranya layanan digital pemerintah yang berkualitas dan terpadu

**Indikator:**

- Jumlah layanan publik prioritas yang terintegrasi dalam portal pelayanan publik

**ProP:**

- Pengembangan Layanan Publik Prioritas berbasis Digital
- Penguatan Tata Kelola Layanan Perizinan Berusaha
- Penguatan Layanan Administrasi Pemerintahan
- Transformasi Pelayanan Pertanahan

Stakeholders Terkait:



### KP.07.10.05 Penguatan Ketersediaan dan Pemanfaatan Data

**Sasaran:** Tersedianya data pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk interoperabilitas dan lintas instansi yang mendukung layanan digital nasional

**Indikator:**

- Persentase cakupan Peta Dasar Skala Besar untuk Wilayah Indonesia
- Persentase Simpul Jaringan Informasi Geospasial dengan Kinerja Unggul
- Persentase IGT yang termanfaatkan
- Nilai Indeks Satu Data Indonesia

**ProP:**

- Tata Kelola Data
- Penguatan dan Pemanfaatan Data Kependudukan
- Peningkatan Akses dan Pemanfaatan Informasi Geospasial Tematik
- Penyediaan Peta Dasar Skala Besar

Stakeholders Terkait:



# TANTANGAN TRANSFORMASI

dalam

## PENGEMBANGAN LAYANAN DIGITAL PEMERINTAH TERPADU



Pemanfaatan berbagai pakai data lintas sektor, termasuk pemanfaatan data geospasial untuk berbagai layanan pemerintah

# PERUBAHAN PARADIGMA E-GOVERNMENT – DIGITAL GOVERNMENT

**id.EA**  
(Indonesia Enterprise Architecture)

Melalui pemanfaatan **Arsitektur SPBE**, pemerintah Indonesia dapat melompat fase digitalisasi administrasi pemerintahan, menuju fase **GovTech**

## e-Government

1. Layanan berbasis user & penyediaan oleh instansi
2. Layanan berbasis elektronik, masih terdapat kegiatan fisik
3. Interoperabilitas Sistem Informasi

## GovTech

1. Layanan inklusif berbasis Citizen Centric, berbasis outcome
2. Implementasi Transformasi Digital secara Nasional (Government-Wide)
3. Sistem Pemerintah yang sederhana, efisien, & transparan

## Fase digitalisasi Indonesia

## Analog Government

## Digital Government

1. Desain prosedur layanan berbasis digital
2. Layanan bersifat citizen centric
3. Data-driven policy
4. Proaktif layanan administrasi pemerintah



**Indonesia**  
**@palm\_ur\_hand**

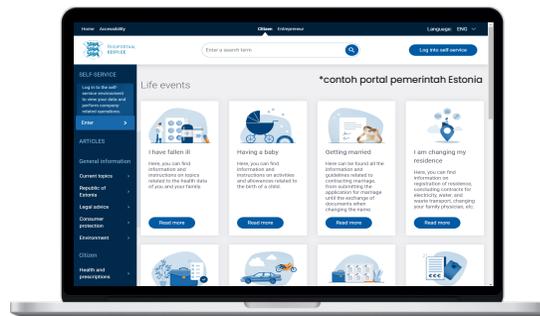
# Visi Transformasi Layanan Digital Pemerintah

**Fokus ke kebutuhan masyarakat, bukan kewenangan instansi.**

**Menu di portal layanan publik sangat jelas dan praktis:**

- layanan apabila sakit,
- layanan untuk menikah,
- langkah mengganti alamat,
- layanan apabila di PHK,
- dsb

**PRAKTIK BAIK INTERNASIONAL PORTAL LAYANAN PUBLIK ESTONIA**



**NEGARA HADIR KAPAN PUN, DI MANA PUN**

**CEPAT MUDAH MURAH**

Transformasi masif layanan negara dengan teknologi digital.

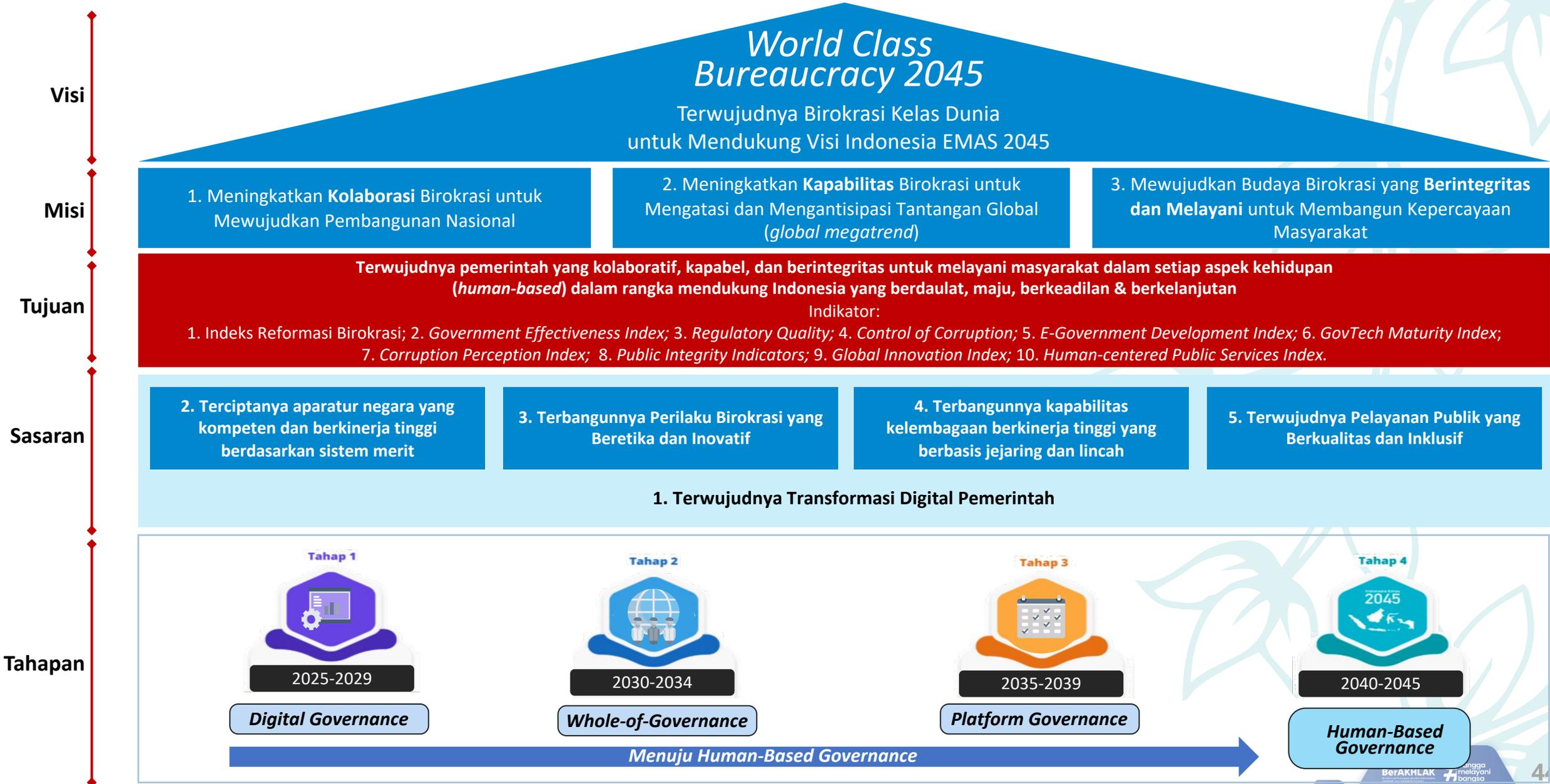
**Pemerintah perlu mewujudkan layanan yang berorientasi pengguna (*user centric*) Proaktif, personal, dan terpadu, dari lahir sampai meninggal (siklus hidup)**

**\*Ilustrasi**



Interaksi aktif masyarakat/user dalam penyelenggaraan layanan publik (*Open Government for Governance 5.0*)

# GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI NASIONAL (GDRBN) 2025-2045





## RB Penanggulangan Kemiskinan



**Penguatan Tata Kelola birokrasi agar besarnya anggaran kemiskinan berdampak optimal pada penurunan kemiskinan, serta peningkatan kualitas layanan siklus hidup kepada masyarakat**

**Cara kerja kolaboratif dalam penyelesaian akar masalah pengelolaan program kemiskinan.**

## RB Peningkatan Investasi



**Penguatan Tata Kelola birokrasi agar terjadi penyederhanaan proses bisnis layanan berusaha dan kemudahan layanan publik untuk dunia usaha**

**Dukungan terhadap kemudahan investasi.**

## RB Pengelolaan Sumber Daya dan Hilirisasi



**Penguatan Tata Kelola birokrasi agar terjadi efektivitas penerimaan negara dan efisiensi belanja publik, serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat**

**Dukungan terhadap nilai tambah ekonomi.**

## RB Percepatan Prioritas Aktual Presiden

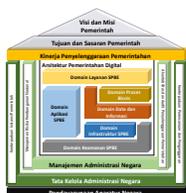


**Penguatan tata kelola birokrasi terhadap Program Prioritas Presiden.**

**Contoh: Swasembada pangan, energi, air dan ekonomi; Makan Bergizi Gratis.**

## RB Transformasi Digital Pemerintah

**Transformasi digital pemerintah berbasis arsitektur pemerintah digital menjadi pilar bagi program Reformasi Birokrasi Tematik yang berdampak luas bagi Masyarakat, dengan prioritas utama: 1. Pengentasan kemiskinan, 2. layanan berusaha, 3. administrasi pemerintahan, 4. penerimaan negara, dan 5. layanan digital siklus hidup.**



# STRATEGI PEMERINTAH DIGITAL 2025-2045

Visi

Terwujudnya Pemerintah Digital untuk Mendukung Visi Indonesia Emas 2045

Misi

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang **transformatif** melalui **pemanfaatan teknologi digital dan keterpaduan data**

2. Mengembangkan transformasi digital pemerintah yang **kolaboratif dan berorientasi pengguna**

3. Meningkatkan **penguatan sistem digital yang terintegrasi dan tepercaya**, yang adaptif, inovatif, serta memiliki kemandirian sumber daya

Tujuan

Terwujudnya pemerintah digital yang adaptif, inovatif, kolaboratif, dan terpadu untuk melayani masyarakat dalam setiap aspek kehidupan, mewujudkan administrasi pemerintahan terintegrasi, menciptakan iklim usaha yang kondusif, serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam rangka mendukung Indonesia yang berdaulat, maju, berkeadilan dan berkelanjutan.

**Indikator:** 1. Indeks Pemerintah Digital; 2. E-Government Development Index; 3. World Digital Competitiveness Ranking 4. Government Effectiveness Index; 5. Control of Corruption; 6. GovTech Maturity Index; 7. Corruption Perception Index; 8. Public Integrity Indicators; 9. Global Innovation Index; 10. Human-centered Public Services Index.

Sasaran

2. Peningkatan Budaya dan Kompetensi Digital Aparatur Sipil Negara

3. Penguatan Ketersediaan dan Pemanfaatan Data untuk Mendukung Pemerintah Digital

4. Penguatan Teknologi Digital untuk Transformasi Layanan Pemerintah

1. Penguatan Kebijakan, Tata Kelola, dan Manajemen Transformasi Digital Pemerintah

Tahapan

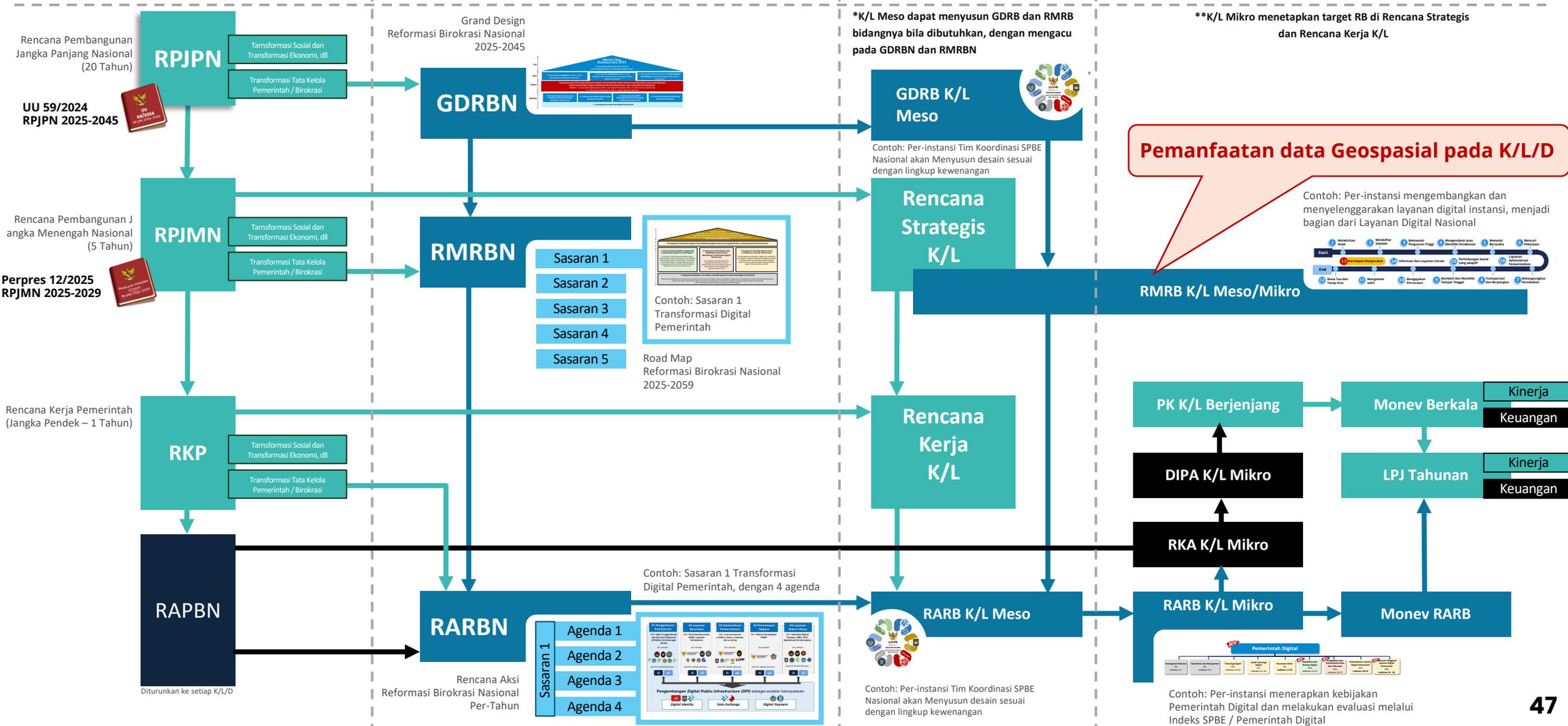
	Tahap 1: 2025-2029	Tahap 2: 2030-2034	Tahap 3: 2035-2039	Tahap 4: 2040-2045
RPJPN	Penguatan Transformasi	Akselerasi Transformasi	Ekspansi Global	Perwujudan Indonesia Emas
GDRBN	Digital Governance	Whole of Governance	Platform Governance	Human-Based Governance
Pemdi	Tata Kelola Pemerintah Digital	Keterpaduan Pemerintah melalui Sistem Terintegrasi dan Tepercaya	Pemerintah Digital sebagai Fondasi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	Pemerintahan yang Humanis
	Tata kelola pemerintahan yang transformatif melalui pemanfaatan teknologi digital dan keterpaduan data yang dapat diandalkan	Tata kelola pemerintahan yang berbasis jejaring dan kolaboratif antar-instansi pemerintah	Pemerintah Terpadu untuk wujudkan Transformasi Indonesia, melalui pemanfaatan sistem digital yang terintegrasi dan tepercaya, yang adaptif, inovatif, serta memiliki kemandirian sumber daya	Pemerintah terpadu yang humanis, berbasis pada inklusifitas, personalisasi, dan masyarakat Indonesia yang berdaya menuju Indonesia yang berdaulat, maju, berkeadilan dan berkelanjutan

## NASIONAL

## MAKRO

## MESO\*

## MIKRO\*\*



# KETERPADUAN LAYANAN DIGITAL TIDAK HANYA TENTANG INTEGRASI SISTEM, MELAINKAN MEMBAWA DAMPAK YANG NYATA UNTUK MASYARAKAT INDONESIA

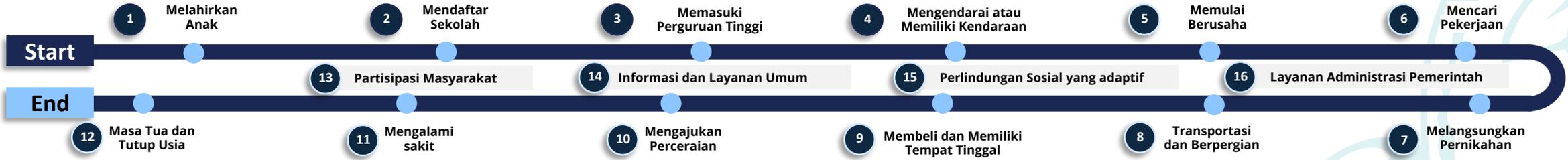
Setiap instansi pemerintah, harus hadir dalam berbagai sisi kehidupan masyarakat dengan menjadi bagian dalam layanan digital pemerintah yang proaktif, personal, dan terpadu





# Pemetaan layanan prioritas untuk menjawab kebutuhan pengguna(1/2)

Analisis awal calon Inisiatif Strategis Pemerintah Digital dari berbagai dokumen perencanaan dan arahan



## Inisiatif Strategis

## Inisiatif Strategis

1. Layanan kesehatan untuk semua

- 1 Konsultasi Ibu Hamil Menyusui dan Melahirkan
- 11 Pencarian Faskes dan dokter spesialis
- 11 Layanan Telemedicine
- 11 Pemeriksaan Kesehatan Gratis
- 11 Layanan rekam medis
- 11 Aplikasi Satu Sehat

2. Layanan Pendidikan berkualitas

- 2 Informasi Kurikulum; syarat kelulusan SD, SMP, dan SMA/SMK
- 3 Informasi Perguruan Tinggi dan Jurusan Akreditasi
- 2 Platform Digital Sekolah
- 3 Pendaftaran SD, SMP, dan SMA/SMK
- 3 Pendaftaran Perguruan Tinggi
- 3 Beasiswa (LPDP/ Bidik Misi)
- 3 Penyetaraan Ijazah LN
- 16 Sertifikasi Guru PPG

3. Layanan perlindungan sosial yang adaptif

- 15 Makan Bergizi Gratis (MBG)
- 15 Program pembiayaan Pendidikan (KIP, KIP Plus, PIP)
- 15 Asuransi Terkait Kematian (Non-BPJS)
- 15 Bansos PKH
- 15 Layanan Penghapusan utang usaha UMKM dan Usaha Tani
- 12 Layanan lansia
- 15 DTSN
- 5 & 15 Koperasi Desa MP

4. Layanan ketenagakerjaan melalui Sistem Informasi Pasar Kerja (SIPK)

- 6 Prakerja dan Layanan Lowongan Kerja
- 6 Kartu Kuning
- 6 Layanan Kesejahteraan dan PHK

5. Layanan penerbitan SIM Online/Surat BPKB

- 8 SIM Online
- 8 Informasi rambu lalu lintas
- 8 Perpanjang SIM Online
- 8 Pelanggaran lalu lintas (e-Tilang)
- 8 Prosedur SIM Internasional Online
- 8 STNK dan BPKB

6. Layanan pernikahan/ perceraian

- 7 Penerbitan akta perkawinan non muslim
- 10 Layanan Pendaftaran Perceraian
- 7 Layanan Pendaftaran Pernikahan
- 10 Penerbitan Akta Perceraian

7. Layanan perijinan berusaha

- 5 OSS RBA
- 5 Layanan pembuatan badan hukum, perizinan berusaha, dan perizinan lainnya

8. Layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil

### Single Identity Number

- 1 Surat Kelahiran
- 1 Pembuatan KIA
- 10 Pemecahan KK setelah bercerai
- 1 Akte Kelahiran
- 7 Penerbitan KK setelah menikah
- 10 Perubahan KTP setelah bercerai
- 1 Update Kartu Keluarga
- 7 Perubahan KTP setelah menikah
- 12 Administrasi Kematian
- 14 IKD

9. Layanan imigrasi

- 8 Paspor dan Visa (Perpanjangan, Pendaftaran)
- 8 Portal Konsulat (Informasi Perwakilan Indonesia)

10. Layanan perpajakan

- 5 Pelaporan pajak badan usaha
- 14 Layanan Informasi PBB
- 14 Pembayaran Digital (DPI)
- 5 & 6 Administrasi Keuangan (NPWP, PPh)
- 7 & 10 Penggambungan dan Pemisahan NPWP
- 5 & 6 Administrasi Non Aktif Pajak dan Keuangan (NPWP)
- 5 & 6 Sistem Perpajakan Modern

11. Layanan perlindungan anak dan perempuan

- 15 Layanan Rujukan Akhir Korban Kekerasan Anak dan Perempuan

Referensi RPJPN 2025-2045 (20 Tahun)

★ Digital Public Infrastructure

Referensi RPJMN 2025-2029 (5 Tahun)

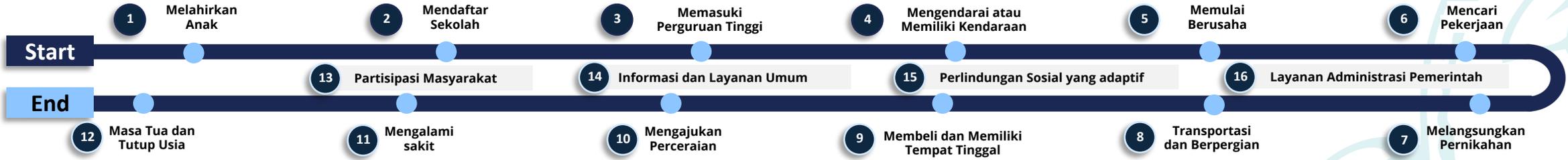
★ Fokus Presiden/Asta Cita



# panrb Pemetaan layanan prioritas untuk menjawab kebutuhan pengguna(1/2)

KEMENTERIAN PENYAYAKSIAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

## Analisis awal calon Inisiatif Strategis Pemerintah Digital dari berbagai dokumen perencanaan dan arahan



### Inisiatif Strategis

### Inisiatif Strategis

12. Layanan informasi dan deteksi dini bencana berbasis geospasial	<ul style="list-style-type: none"> <li>14 Informasi Cuaca, Iklim, Kualitas Udara, Gempa Bumi, Tsunami, Bencana, Risiko Bahaya berbasis Geospasial</li> <li>15 ★ Layanan Tanggap Penanganan Bencana</li> </ul>
13. Layanan digital data terbuka pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>14 ★ Satu Data Indonesia</li> <li>16 ★ Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (DPI)</li> </ul>
14. Layanan produk halal dan produk obat dan makanan tersertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 Prosedur Sertifikasi Halal Reguler</li> <li>5 Prosedur Sertifikasi Halal Reguler Gratis</li> <li>5 Perizinan Obat dan Makanan</li> <li>5 Layanan Informasi Obat dan Makanan</li> <li>14 Layanan Pengawasan Produk</li> </ul>
15. Layanan Hukum Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>12 Administrasi Hukum dan Warisan</li> <li>14 Single Prosecution System</li> </ul>
16. Layanan subsidi tepat sasaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>15 Layanan Kelistrikan dan Bahan Bakar</li> </ul>
17. Layanan digital pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 Konsultasi Pertanian Online</li> <li>5 Perizinan Pertanian</li> <li>15 Data Subsidi Pertanian</li> </ul>
18. Layanan administrasi pemerintahan terpadu	<ul style="list-style-type: none"> <li>16 Perencanaan</li> <li>16 Penganggaran</li> <li>16 Keuangan</li> <li>16 Kearsipan (Statis dan Dinamis termasuk naskah dinas)</li> <li>16 Pengaduan Layanan</li> <li>16 Pengadaan</li> <li>14 Informasi Hukum</li> </ul>

19. Layanan Manajemen ASN	16 Portal Manajemen ASN
20. Layanan Pusat Data Nasional	16 Pusat Data Nasional (Infrastructure as a Service)
21. Layanan Keamanan, Siber, Sandi, dan Sinyal	<ul style="list-style-type: none"> <li>16 Sertifikat Elektronik</li> <li>16 Layanan Audit Keamanan</li> <li>16 Layanan Penetration Test</li> </ul>
22. Layanan Keberlangsungan Layanan Digital	<ul style="list-style-type: none"> <li>16 Business Continuity Service</li> <li>16 ★ CSIRT</li> </ul>
23. Layanan Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>9 Sertifikat kepemilikan tempat tinggal Digital</li> <li>9 Prosedur dan tata cara membeli tempat tinggal</li> <li>9 Prosedur mendapatkan IMB/PPBG</li> <li>9 ★ Rumah Murah MBR dan Gen Z, BPHTB, Layanan FLPP</li> </ul>
24. Layanan Partisipasi Masyarakat *	<ul style="list-style-type: none"> <li>13 Layanan Partisipasi pemilihan umum</li> <li>13 Forum diskusi lokal inisiatif warga</li> <li>13 Pengaduan terhadap layanan pemerintah dan informasi ke darurat (kejahatan, keamanan dan ketertiban)</li> </ul>

Referensi RPJPN 2025-2045 (20 Tahun)

Referensi RPJMN 2025-2029 (5 Tahun)

★ Digital Public Infrastructure

★ Fokus Presiden/Asta Cita

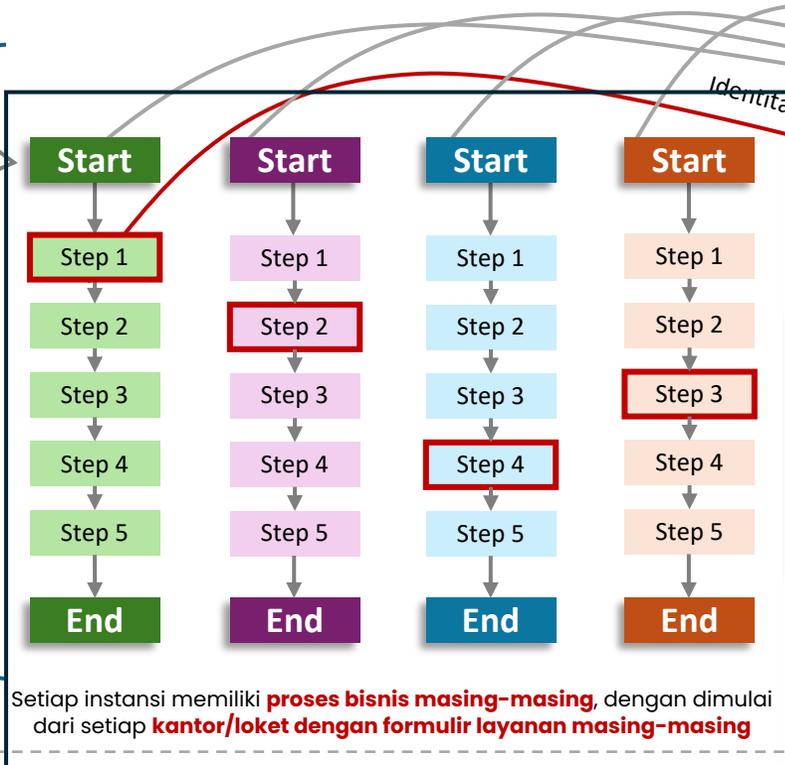
\* Penerapan Open Government, mendukung pelaksanaan Open Government Indonesia (OGI)

# Konsepsi Modularity and Integration Services = Shared Outcome



Masyarakat dapat memulai dari manapun portal layanan yang dimiliki oleh instansi, akan tetapi dapat mendapatkan berbagai layanan instansi lainnya yang terkait

Kementerian PANRB memiliki peran sentral dalam **pembinaan proses bisnis** instansi dan dapat **melihat secara makro** lintas sektor



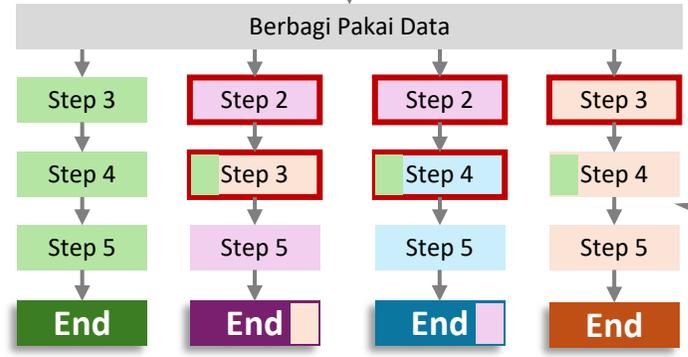
Setiap instansi memiliki **proses bisnis masing-masing**, dengan dimulai dari setiap **kantor/loket dengan formulir layanan masing-masing**

Identitas Digital Terpadu dan Standar formulir

Konsolidasi Portal Layanan dan Konsolidasi Customer Services

Start

Step 1



Masyarakat dapat memanfaatkan portal layanan terintegrasi dan mendapatkan berbagai layanan instansi lainnya yang telah terintegrasi

Proses bisnis "Back Office" layanan pemerintah dapat saling kolaborasi melalui sistem terintegrasi. Analisa memanfaatkan Arsitektur Pemerintah Digital

## Transformasi Layanan Pemerintah

1. Pemanfaatan **tematik proses bisnis**, sehingga dimungkinkan proses bisnis instansi dapat saling berkolaborasi dalam membentuk layanan terpadu
2. Mengutamakan **proses bisnis yang dimiliki oleh Instansi Pembina sebagai referensi proses bisnis yang digunakan seluruh instansi** (contoh: proses bisnis verifikasi dan validasi data penduduk sebagai user, berada di dukcapil)
3. Mengutamakan **pemanfaatan formulir atau isian data dengan SOP yang bersifat standar untuk memperoleh layanan**, selanjutnya mendorong kantor layanan bersama baik di internal instansi hingga eksternal lintas instansi, mendorong penerapan Mal/Warung/Kios Pelayanan Publik
4. **Fokus pada target pembinaan proses bisnis instansi dengan Target Presiden dan arah Pembangunan Nasional**

# Kerangka Kerja Arsitektur Pemerintah Digital

Transformasi digital tidak hanya fokus pada digitasi ataupun digitalisasi, tapi memastikan peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat

*"Transformasi Digital = Transformasi Efisiensi"*

**Peningkatan  
efisiensi dan efektivitas  
penyelenggaraan pemerintahan**

**Up-Systeming**

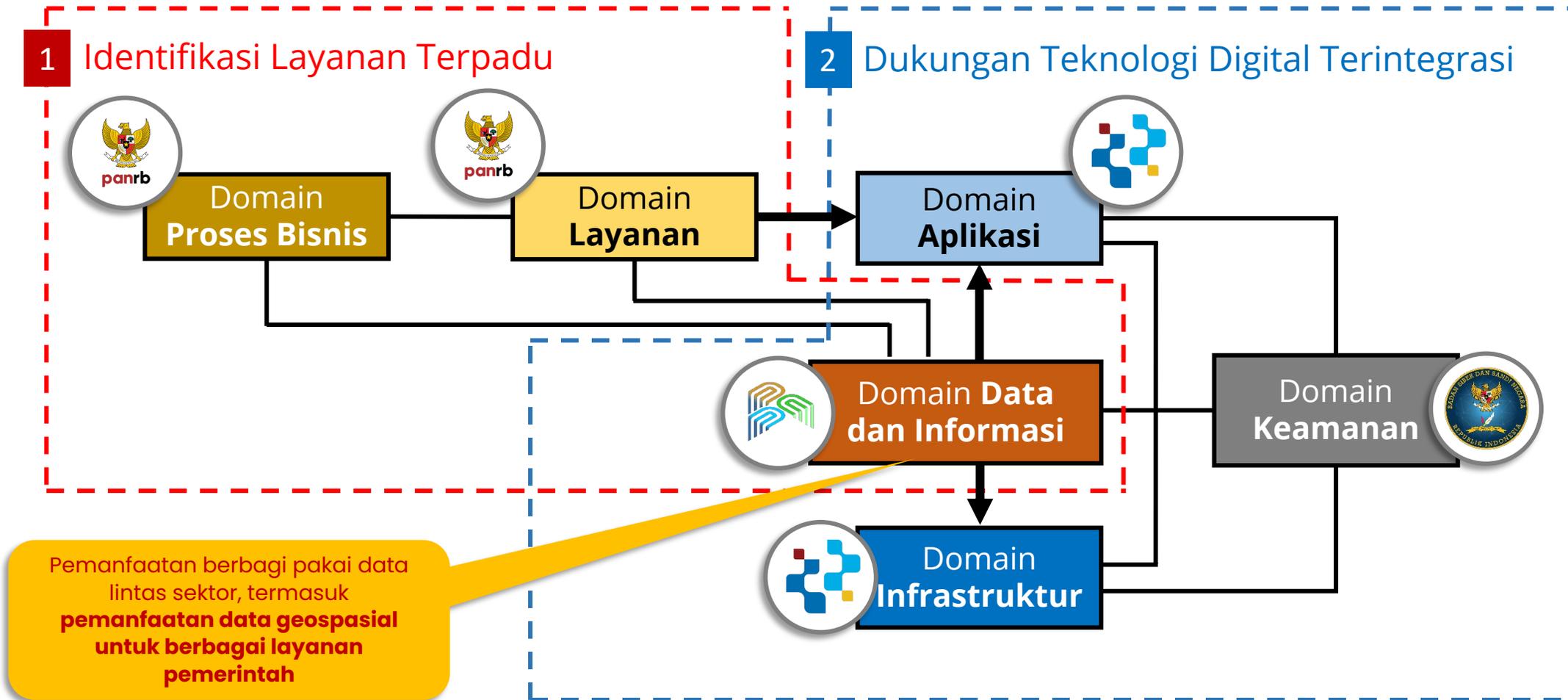
**Up-Skilling**

**Re-Skilling**



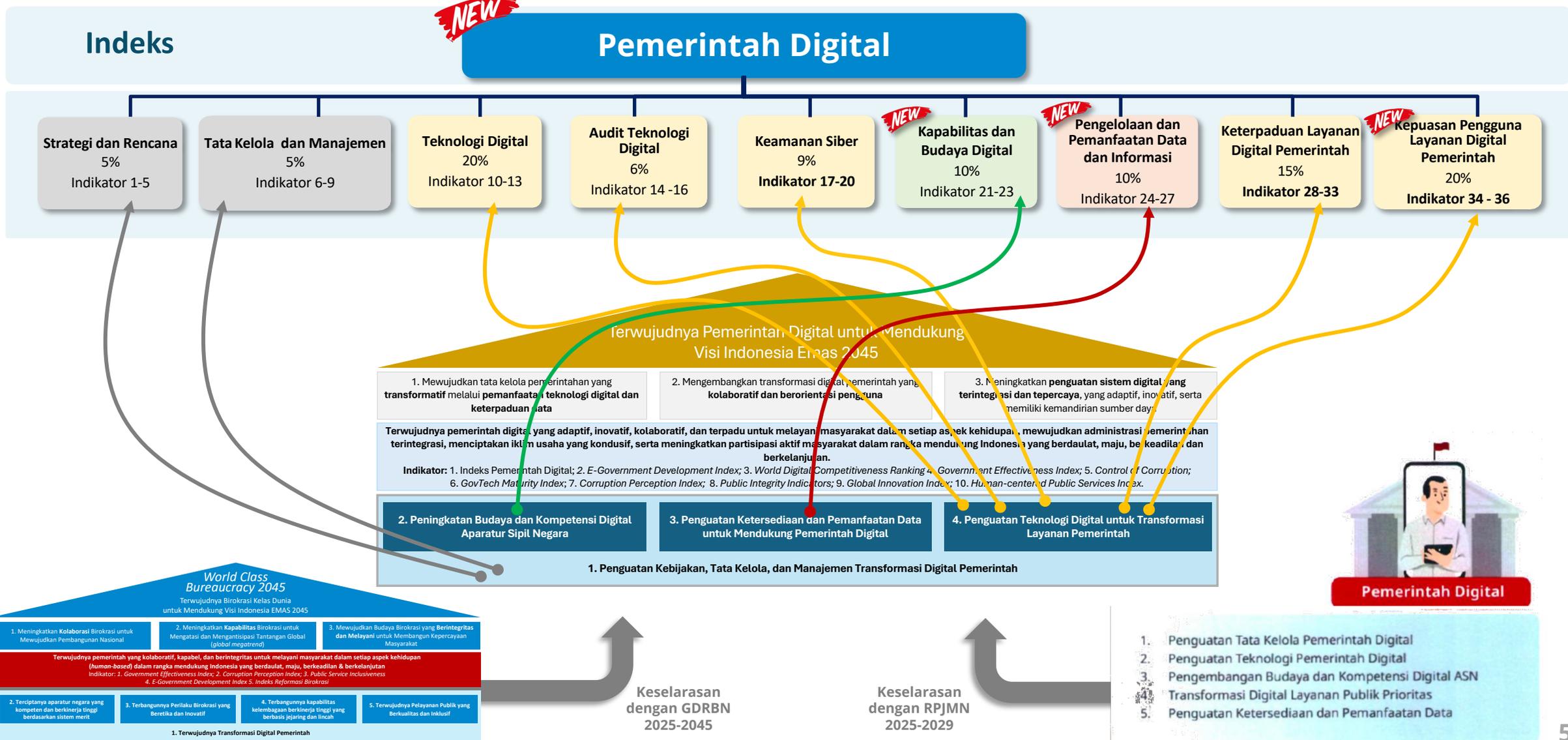
# Keterpaduan Pelaksanaan Transformasi Digital Pemerintah dilaksanakan dalam kerangka kerja **Arsitektur Pemerintah Digital**

Setiap K/L memiliki **peran yang penting untuk membina domain** dalam arsitektur pemerintah digital. Keterpaduan transformasi digital dimulai dari **identifikasi layanan terpadu (proses bisnis, layanan, data dan informasi)** yang didukung oleh **teknologi digital yang terintegrasi (aplikasi, data dan informasi, infrastruktur, keamanan)** dan berorientasi **kemudahan pengguna (user centric)**



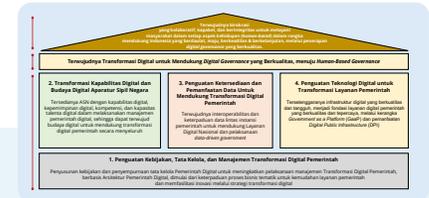
# MODEL INDIKATOR EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DIGITAL

Pergeseran fokus evaluasi dari kapabilitas dan kebijakan (hulu), ke kinerja, implementasi, dampak, dan kepuasan pengguna (hilir)



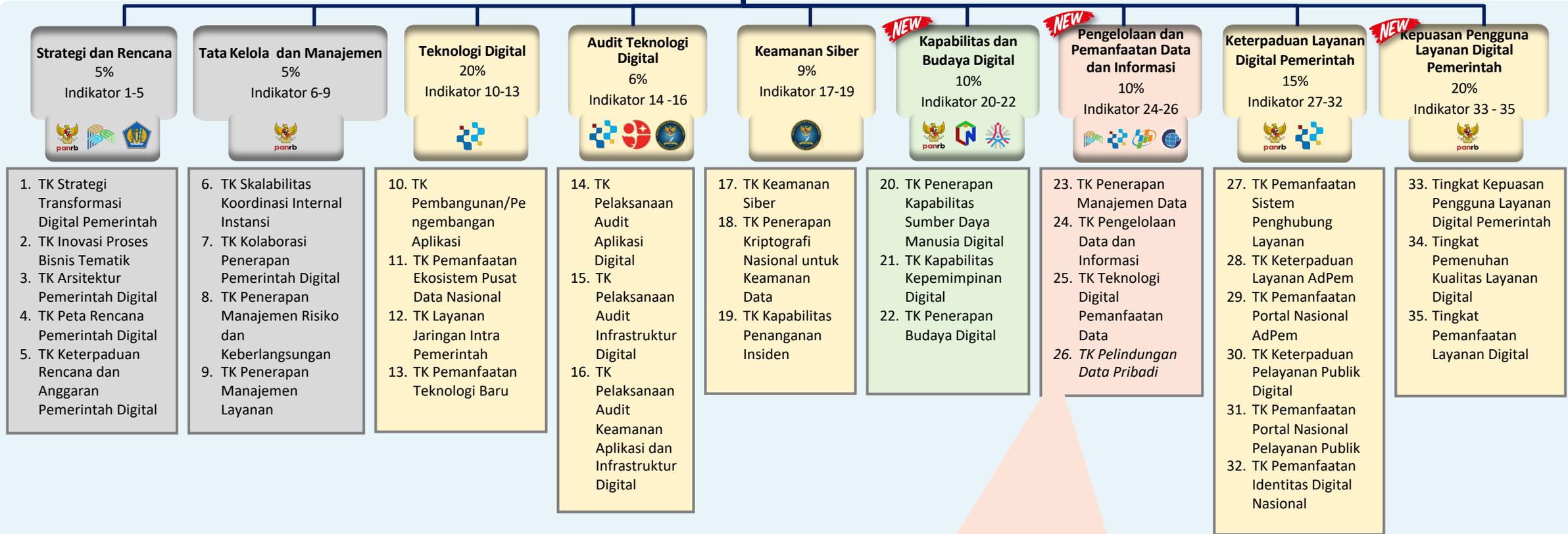
# MODEL INDIKATOR EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DIGITAL

Pergeseran fokus evaluasi dari kapabilitas dan kebijakan (hulu), ke kinerja, implementasi, dampak, dan kepuasan pengguna (hilir)



## Indeks

## Pemerintah Digital



**#24. Pemanfaatan data Geospasial**

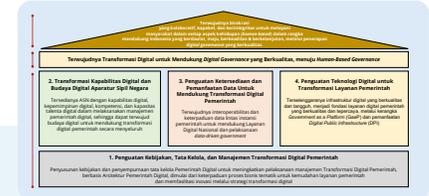
# KONSEP MODEL KRITERIA DAN KONDISI TINGKAT KEMATANGAN EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DIGITAL (Indikator 24 – Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi)

Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses **Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi** akan berfokus pada Penerapan Tata Kelola Satu Data Indonesia (SDI) yang secara faktual telah diimplementasikan terhadap **pemanfaatan data Statistik dan Geospasial** oleh IPPD, direpresentasikan melalui **Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor/Indeks Pembangunan Statistik (IPS)** dan **Evaluasi Jaringan Informasi Geospasial Nasional/Indeks Bhumandala**.

No	Aspek	Indikator	Bobot	Deskripsi	1 - Initiate	2 - Emerging	3 - Developing	4 - Embedded	5 - Leading	Instansi Pembina
24	Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi	Tingkat Kematangan Operasional Pemanfaatan Data dan Informasi	3%	Kemampuan/kapabilitas dari Instansi Pemerintah dalam pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data dan informasi antar portal lintas sektor yang mengutamakan berbagi pakai data termasuk di dalamnya pemanfaatan data statistik (indikator penilaian diselaraskan dengan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor/ Indeks Pembangunan Statistik) dan geospasial (indikator penilaian diselaraskan dengan evaluasi Jaringan Informasi Geospasial Nasional/ Indeks Bhumandala), sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, sehingga dapat dimanfaatkan data lintas sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyediaan layanan pemerintah Instansi Pemerintah dalam Pengelolaan Data yang mencakup proses Perencanaan, Pengumpulan, Pemeriksaan hingga Penyebarluasan sesuai dengan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia.	<p><b>Kriteria:</b> Pengelolaan Data dan Informasi, serta pemanfaatan data statistik dan geospasial masih sangat terbatas dan dilaksanakan tanpa pedoman dan perencanaan.</p> <p><b>Kondisi:</b> SDI 0 - 30; IPS &lt;1,80; dan Bhumandala &lt;1,80</p>	<p><b>Kriteria:</b> Instansi Pusat/ Daerah telah mengembangkan pedoman dan prosedur untuk pengelolaan data dan informasi secara terstruktur dan terencana, namun pemanfaatan data statistik dan geospasial masih dilakukan sebagian.</p> <p><b>Kondisi:</b> SDI &gt;30 - 50; IPS &gt;1,80 - 2,60; dan Bhumandala &gt;1,80 - 2,60</p>	<p><b>Kriteria:</b> Instansi Pusat/ Daerah telah melaksanakan pengelolaan data dan informasi secara terstruktur sesuai prinsip penyelenggaraan Satu Data Indonesia, serta pemanfaatan data statistik dan geospasial telah diterapkan, namun belum optimal dan terintegrasi.</p> <p><b>Kondisi:</b> SDI &gt;50 - 70; IPS &gt;2,60 - 3,50; dan Bhumandala &gt;2,60 - 3,50</p>	<p><b>Kriteria:</b> Kriteria Tingkat Kematangan 3 telah dipenuhi.</p> <p>Pemanfaatan data statistik dan geospasial telah optimal dan terintegrasi, serta dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaannya secara berkala.</p> <p><b>Kondisi:</b> SDI &gt;70 - 90; IPS &gt;3,50 - 4,20; dan Bhumandala &gt;3,50 - 4,20</p>	<p><b>Kriteria:</b> Kriteria Tingkat Kematangan 4 telah dipenuhi.</p> <p>Optimalisasi penyelenggaraan Satu Data dan Satu Peta pada Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah yang memberikan dampak secara nasional.</p> <p><b>Kondisi:</b> SDI &gt;90 - 100; IPS &gt;4,20 - 5,00; dan Bhumandala &gt;4,20 - 5,00</p>	Kementerian PPN/Bappenas, BPS, BIG

# MODEL INDIKATOR EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DIGITAL

Pergeseran fokus evaluasi dari kapabilitas dan kebijakan (hulu), ke kinerja, implementasi, dampak, dan kepuasan pengguna (hilir)



## Indeks

## Pemerintah Digital



### Sesuai Arah RPJMN: 5 Fokus Utama Pemerintah Digital

Indeks disesuaikan untuk mendukung RPJMN dengan lima fokus utama: tata kelola, teknologi, kompetensi ASN, layanan publik digital, dan data.



### Pembinaan di 2025, Evaluasi Bertahap di 2026 & 2028

Akan dimulai pembinaan untuk 46 instansi pusat dan 128 Pemda, sebagai langkah awal evaluasi berkala.



### Fokus pada Dampak, Bukan Aspek Teknologi Digital

Penilaian tak hanya pada kesiapan TIK, tapi juga kepuasan masyarakat terhadap layanan digital pemerintah.



### Disusun Bersama Banyak K/L, Menuju Indeks Konsolidatif Nasional

Model indeks ini dikembangkan bersama K/L seperti Komdigi, Bappenas, BSSN, BIG, BPS, dan BKN — disiapkan sebagai pola indeks nasional bertema digital.



# TRANSFORMASI TATA KELOLA INSTANSI PEMERINTAH

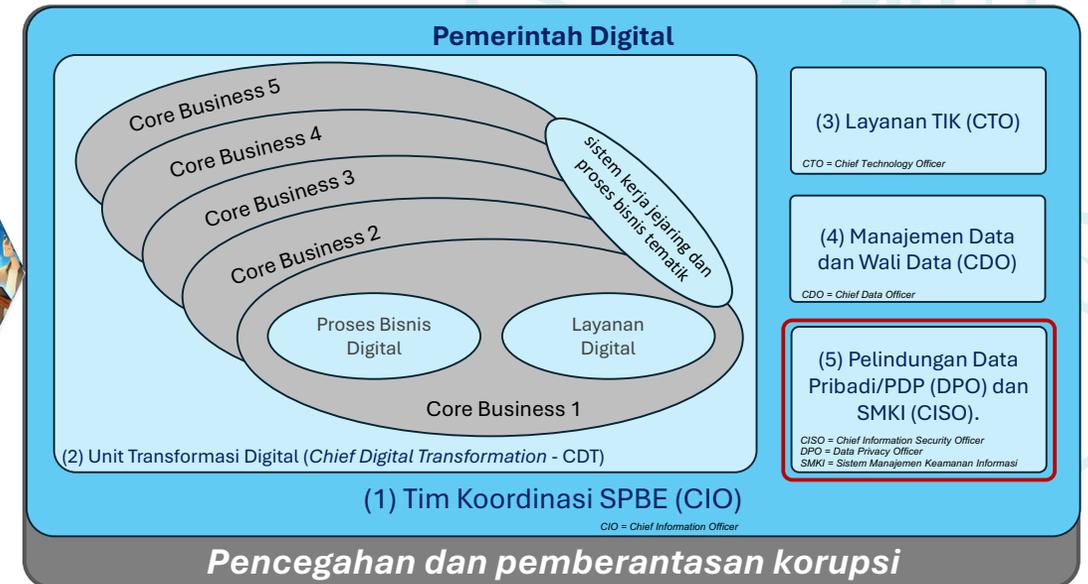
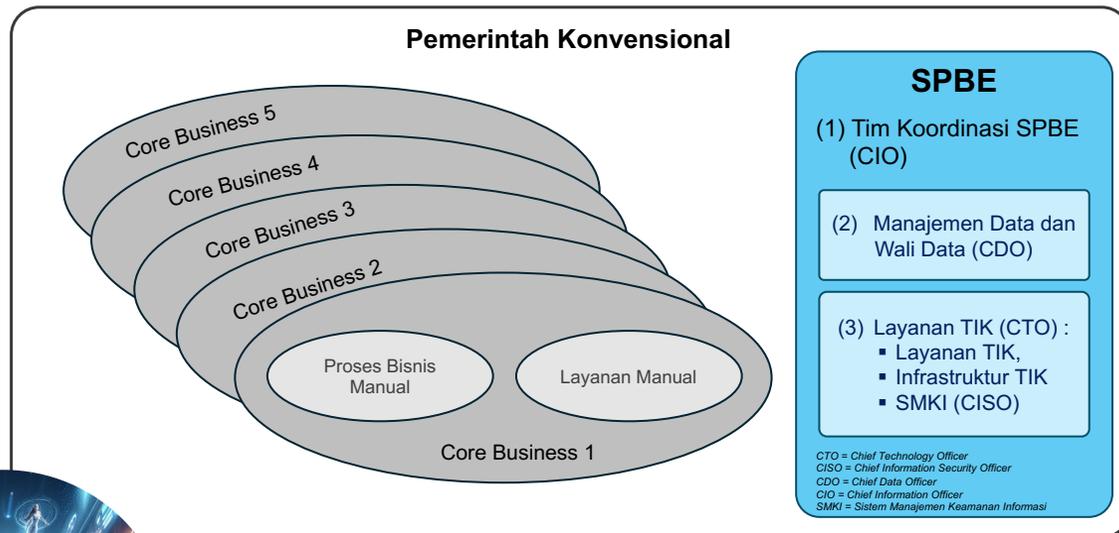


## Existing

- Core business **tidak perlu** punya visi digital.
- Peran transformasi digital **hanya** ke Unit TIK.
- Unit Kerja **tidak menuntut** pegawai memiliki talenta digital.
- Silo** menyelesaikan pekerjaan dan masalah.
- Menemukan cara **bekerja /layanan manual** yang lebih efisien.

## Future

- Core Business **memiliki** visi digital.
- Transformasi digital adalah **ownership** holistik instansi.
- Unit kerja **tidak ingin** pegawai **gaptek**.
- Berkolaborasi untuk mencari solusi dan **solusi digital prioritas**.
- Menemukan cara **berkerja/layanan digital baru** yang lebih efisien, melalui **rancangan** proses bisnis digital (*digital by design*)



**Transformasi Tata Kelola sebagai kunci sukses Modernisasi Administrasi Negara untuk peningkatan kesejahteraan rakyat**





# PENTINGNYA COLLABORATIVE & NETWORK GOVERNANCE DALAM MENDORONG PROGRAM PRIORITAS



**01**

Kompleksitas & dinamika lingkungan meminta respon cepat dari setiap aktor



**02**

Banyaknya *shared outcome* yang perlu dihasilkan



**03**

Pelaksanaan aksi atau inisiatif oleh setiap instansi pemerintah dalam mencapai tujuan/sasaran bersama selama ini masih terkesan *silo*

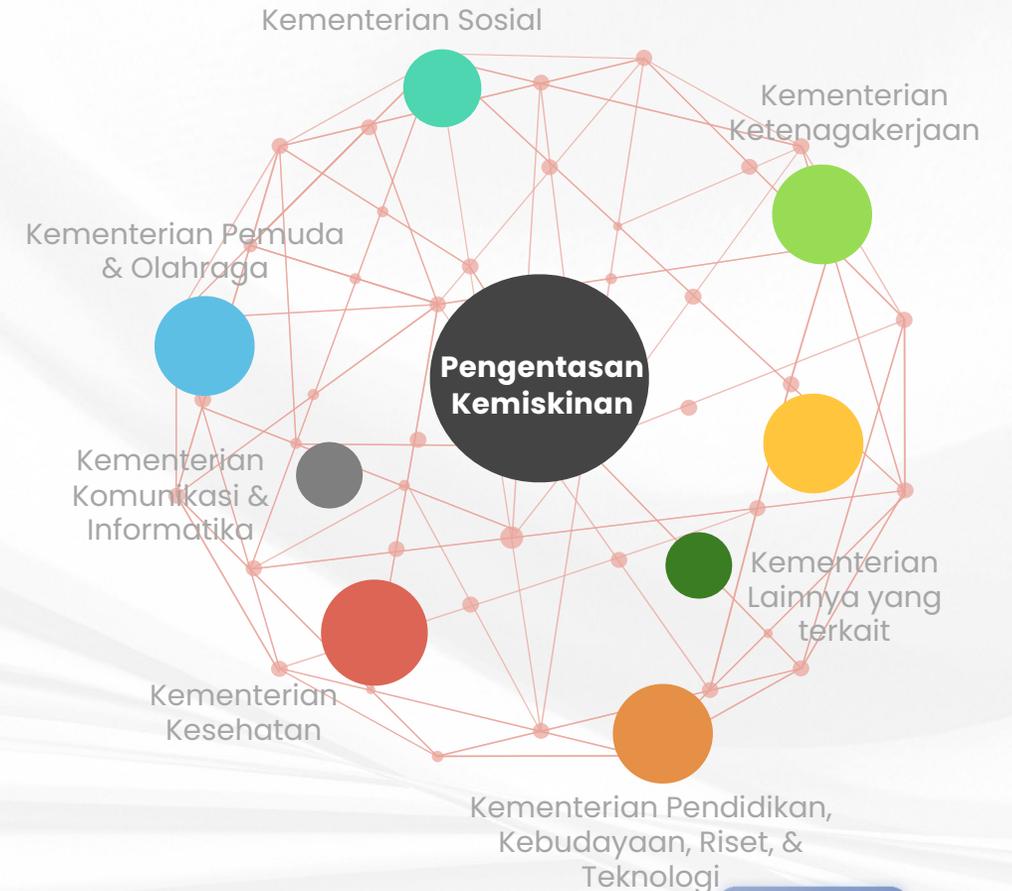


**04**

Banyaknya program/kegiatan yang *redundant* antar-instansi pemerintah, sehingga inefisiensi berpotensi terjadi

## Shared Outcome

Output & Outcome yang dihasilkan harus **didukung** oleh banyak instansi (yang terkait), bukan hanya tanggung jawab 1 instansi saja





# panrb

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**

# TERIMA KASIH

 @kempanrb

 @kemenpanrb

 [www.menpan.go.id](http://www.menpan.go.id)

  @Kementerian PANRB